

Majalah



Biro Pemberitaan Parlemen

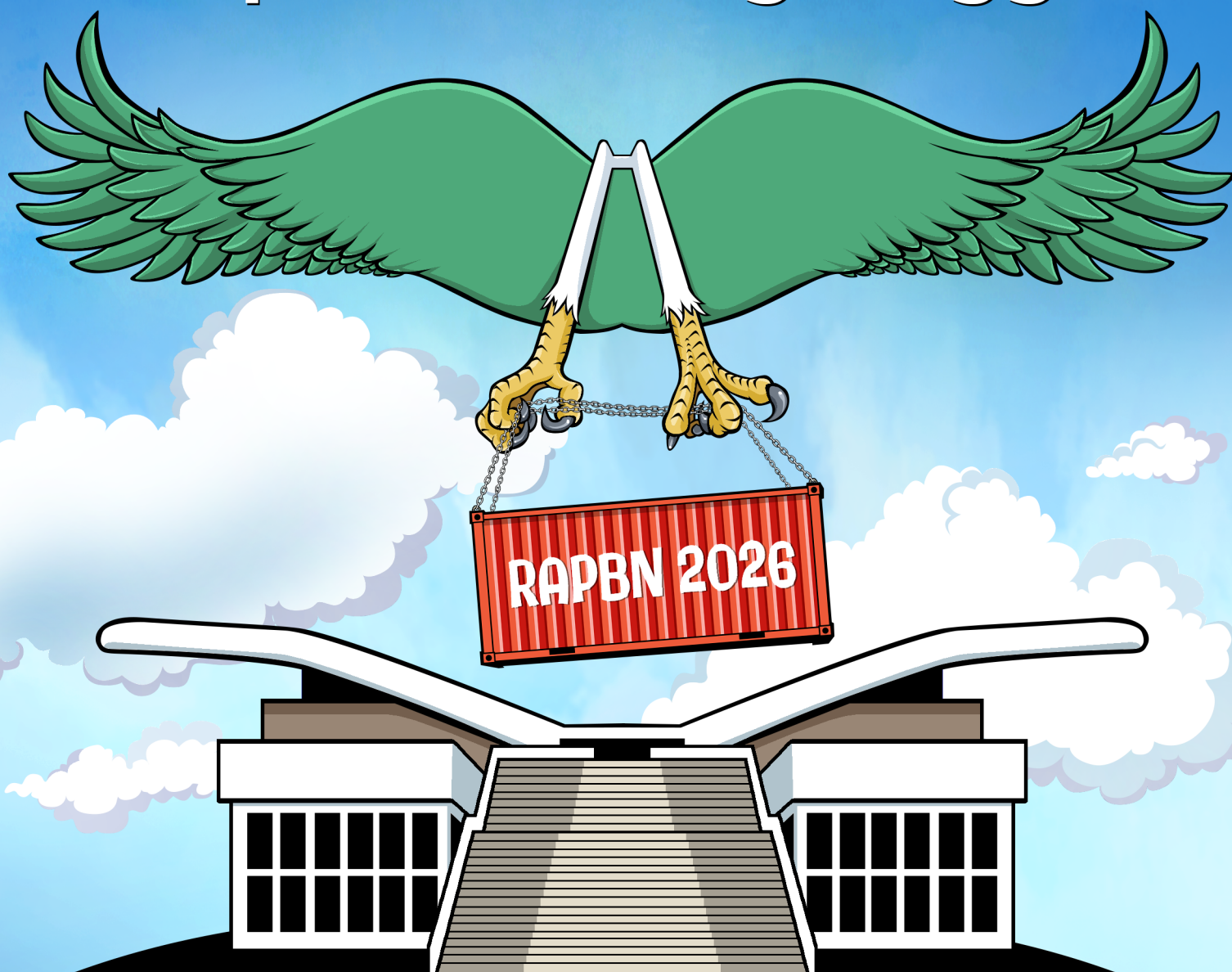
PARLEMENTARIA

80

Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

Kepak Garuda

Tetaplah Terbang Tinggi



EDISI 248
TH. 2025



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.IP., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom, M.A. (Kasubag Analis Media)

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos, M.A. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Muhammad Husen, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Agung Hidayat, Ridwan Budiman, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF, Devi Iriandi, Mario Fernandez

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto, Darmawan

PENERBITAN**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos, M.M. (Kasubag Distribusi), Adi Ardiansyah, MM

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI**STAF DISTRIBUSI DAN SIKULASI**

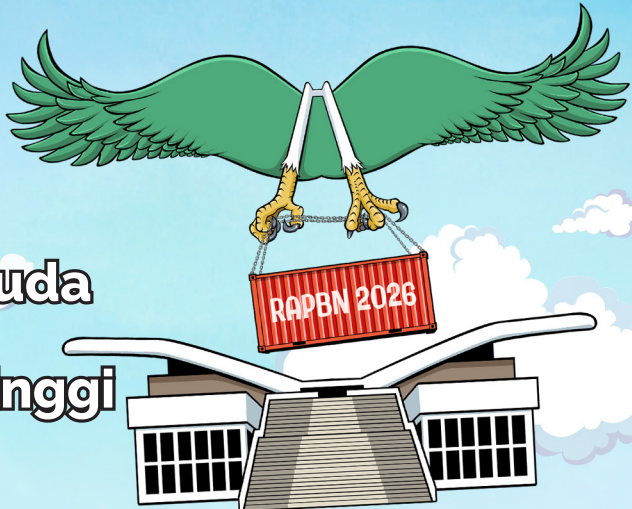
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

LAPORAN UTAMA


Kepak Garuda Tetaplah Terbang Tinggi

4

4

PROLOG

RAPBN 2026 Jalan menuju Indonesia Emas

6

LAPORAN UTAMA

- APBN Harus Mudahkan Hidup Rakyat
- Anggaran Pendidikan Capai Rp 757 Triliun
- Anggaran MBG Naik Tiga Kali Lipat
- Menganggarkan Program Koperasi Merah Putih

14

SUMBANG SARAN

RAPBN Tahun Anggaran 2026

18

PENGAWASAN

BP Haji Naik Kasta Jadi Kementerian

20

ANGGARAN

DPR Desak Mitigasi dan Diversifikasi Pasar Ekspor

22

LEGISLASI

UU Haji

Layanan Jemaah Akan Lebih Terintegrasi

24

FOTO BERITA

28

PROFIL

Sugiat Santoso

Menjaga Mandat, Menjaga Nurani



PENGAWASAN



18 BP Haji Naik Kasta Jadi Kementerian

ANGGARAN



20 DPR Desak Mitigasi dan Diversifikasi Pasar Ekspor

SOROTAN



58 Polemik Pemblokiran Rekening

- 32 KUNKER**
- 58 SOROTAN**
Polemik Pemblokiran Rekening
- 60 LIPUTAN KHUSUS**
Demokrasi Lingkungan, Melawan Krisis Iklim
- 62 DAPIL**
- 70 PERNIK**
Memperingati 60 Tahun CONEFO
Saksi Bisu Mimpi Besar Bangsa
- 72 KIAMAT SEHAT**
Menciptakan Lingkungan Yang Nyaman Bagi Ibu Menyusui
- 74 CATATAN**
Peran Lembaga Legislatif Dalam Penulisan Sejarah Nasional
- 76 LENSAS PARLE**
Delapan Dekade Kemerdekaan Semangat Tak Pernah PADAM

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri

www.dpr.go.id

Kepak Garuda Tetaplah Terbang Tinggi

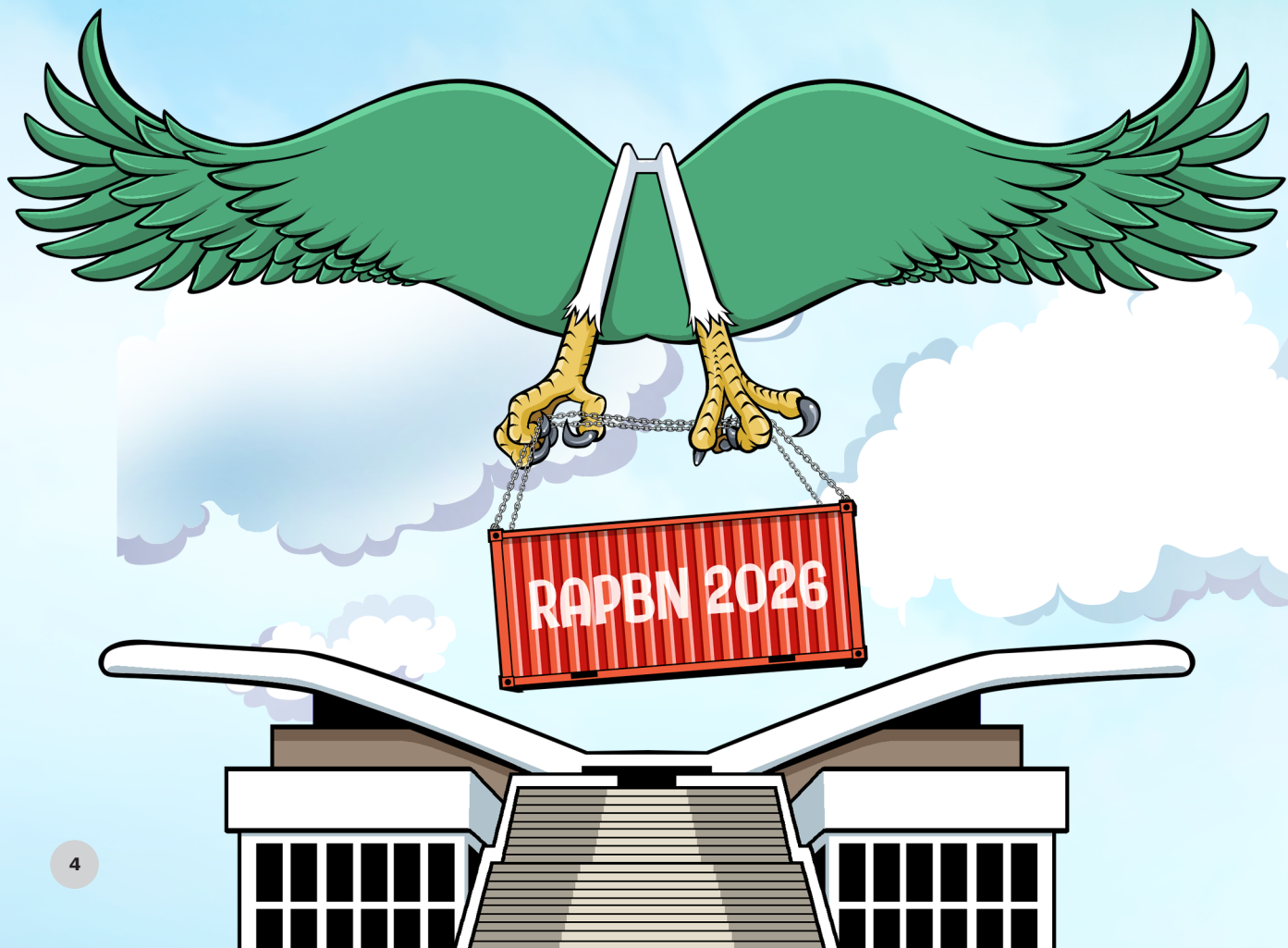
Di gedung ini, di gedung bersejarah beratapkan sayap garuda, semua Presiden RI menyampaikan pidatonya di hadapan para wakil rakyat. Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) disampaikan oleh para presiden setiap tahun dari era Orde Baru hingga kini, termasuk Presiden Prabowo Subianto. RAPBN yang disampaikan di gedung Nusantara yang ikonik membawa metofora semangat bangsa yang ingin terbang tinggi, namun tetap berpijak di bumi pertiwi.



RAPBN yang disusun selalu dihadapkan pada tantangannya masing-masing, sesuai eranya. Bagi Indonesia semua ini

adalah kenyataan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Kita harus tangguh dalam menahan guncangan sekaligus gesit dalam menangkap peluang. Kedaulatan ekonomi menjadi syarat mutlak. Tidak ada bangsa yang dapat berdiri kokoh jika bergantung sepenuhnya pada kekuatan eksternal.

Dalam konteks inilah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merumuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. RAPBN 2026 adalah arsitektur fiskal pertama



yang sepenuhnya dirancang dalam periode pemerintahan baru. Ia hadir bukan sekadar neraca penerimaan dan belanja negara, tetapi sebagai kompas pembangunan nasional: menjaga stabilitas di tengah badai sekaligus mengarahkan langkah menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Kondisi domestik memberi ruang bagi optimisme. Kinerja ekonomi triwulan II-2025 menunjukkan perbaikan nyata. Konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung pertumbuhan tetap terjaga. Investasi meningkat, baik dari dalam negeri maupun asing, seiring dengan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.

Momentum positif ini menjadi dasar bagi RAPBN 2026. Pemerintah menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus menjadi alat untuk memperkuat daya tahan rakyat sekaligus mesin transformasi nasional. Inilah yang membedakan RAPBN 2026 dari sekadar dokumen fiskal rutin. Ia adalah bagian dari strategi besar, memastikan agar pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga berlari menuju sasaran jangka panjang.

APBN adalah milik rakyat. Anggaran negara tidak boleh menjadi angka-angka abstrak di atas kertas. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagaimana Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai haluan utama pembangunan. Pasal ini bukan sekadar teks konstitusi, melainkan landasan filosofis bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dukungan itu diwujudkan dalam komitmen DPR untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Kementerian dan lembaga harus bekerja sebaik-baiknya, mengawal implementasi program prioritas presiden agar tidak hanya berhenti pada janji, tetapi benar-benar



Inilah yang membedakan RAPBN 2026 dari sekadar dokumen fiskal rutin. Ia adalah bagian dari strategi besar, memastikan agar pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga berlari menuju sasaran jangka panjang.

menyentuh dapur rakyat, sekolah, puskesmas, desa, hingga lini pertahanan nasional.

RAPBN 2026 menghadirkan delapan program prioritas yang disusun dengan orientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat dari aspek ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, akselerasi investasi, dan perdagangan global. Kedelapan prioritas ini mencerminkan filosofi pembangunan yang menyeluruh. Dari gizi anak-anak hingga strategi geopolitik, semuanya ditata dalam satu garis kebijakan: kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa.

Dari sisi eksternal, RAPBN 2026 juga dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dunia, tatanan global saat ini bergerak menuju multipolaritas. Konsekuensinya multidimensi: dari moneter, fiskal, perdagangan internasional, hingga politik antarkawasan. Namun, di balik ketidakpastian, Indonesia memiliki peluang besar. Sebagai negara dengan pasar domestik yang kuat, sumber daya alam melimpah, dan

posisi geopolitik strategis, Indonesia dapat menjadi poros penting dalam tatanan global baru.

RAPBN 2026 harus mampu menempatkan Indonesia bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pemain aktif yang menentukan arah permainan. Dengan memperhatikan faktor internal maupun eksternal, tema RAPBN 2026: "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" dinilai sangat relevan. Tema ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi ketahanan nasional yang berkelanjutan.

RAPBN 2026 adalah agenda fiskal yang sarat makna. Meski merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029, ia adalah APBN pertama yang sepenuhnya disusun sesuai visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, RAPBN 2026 menjadi fondasi kokoh bagi target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028 dan jembatan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Di balik angka-angka fiskal, tersimpan tekad bangsa: bahwa Indonesia mampu menghadapi guncangan global, menata ulang fondasi ekonomi, dan menapaki jalan besar menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Parlemen bersama pemerintah, memikul tanggung jawab historis untuk memastikan bahwa APBN benar-benar hadir sebagai instrumen rakyat. Ia harus menjadi peredam guncangan, pendorong transformasi, dan kompas pembangunan.

Majalah Parlemen edisi ini menempatkan RAPBN 2026 sebagai prolog utama. Karena di balik deretan angka, terdapat narasi besar tentang kedaulatan dan keadilan. Bangsa ini sedang menulis babak baru dalam sejarahnya: membangun fondasi yang kokoh, memperkuat ketahanan nasional, dan menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045. Inilah Kepak Garuda yang ikonik, terbang tinggi, mengangkasa dan menebar kesejahteraan di Bumi Pertiwi. 🦅

APBN Harus Mudahkan Hidup Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan RUU APBN 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hari itu, Jumat (15/8). Rancangan APBN 2026 diharapkan mampu membuka kemudahan hidup bagi rakyat Indonesia.



Presiden Prabowo Subianto saat menyerahkan RUU APBN 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).



perekonomian global melambat,

DALAM pidatonya, Puan menyinggung soal dampak situasi global yang tidak menentu. Ini menyebabkan gerak

distribusi komoditas strategis terganggu, dan rantai pasok industri juga terpengaruh. Akhirnya, kondisi moneter, fiskal, sektor riil, dan pendapatan masyarakat di Indonesia ikut terdampak.

Puan mengatakan, APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang daya beli masyarakat,

memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan di segala bidang, selalu memiliki ruang fiskal yang terbatas. "Kebutuhan belanja negara untuk pembangunan akan selalu lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan negara. Karena itu, dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit, maka pemerintah harus menetapkan



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di Senayan, Jumat (15/8/2025).

FOTO: JAKA/VEL

prioritas belanja, serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien," sebutnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, selama satu tahun terakhir pemerintah telah melakukan konsolidasi program kementerian/ lembaga (K/L), termasuk melakukan efisiensi anggarannya. "Bapak Presiden Yang Terhormat, mengenai efisiensi belanja tahun 2025, kementerian/ lembaga curhat-nya ke komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya. Curhat masalah 'cinta segitiga' (yaitu) program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi," ungkap Puan.

"Namun, cinta segitiga tidak harus berakhir dengan patah hati, tuturmya. Semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya," sambung mantan Menko PMK itu. Ia menilai, upaya pemerintah menjalankan efisiensi anggaran sejalan dengan amanat UU Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan.

Di sisi lain, Puan menyinggung soal pembahasan dan keputusan DPR bersama pemerintah soal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2026. Setiap pos anggaran dalam APBN menyimpan harapan besar masyarakat, bukan sekadar angka-angka teknis. Ia meminta agar penyusunan RAPBN 2026 dilakukan dengan empati dan keberpihakan kepada rakyat kecil. APBN Tahun Anggaran 2026 diharapkan ikut memperkuat pembangunan di daerah.

"Di balik setiap pos anggaran APBN, tersembunyi harapan jutaan rakyat, apakah anak mereka bisa terus sekolah? Apakah rakyat bisa berobat? Apakah ada lapangan kerja? bagaimana nasib petani, nelayan, buruh, dan lain sebagainya," papar Puan lagi. Penyusunan dan pembahasan APBN bukanlah urusan teknis belaka, tetapi soal keadilan dan keberpihakan. "RAPBN Tahun 2026 yang disampaikan presiden dapat semakin memudahkan hidup rakyat," tandasnya.

Begitu pula bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, APBN 2026 dapat memperkuat pembangunan di daerah. Ditambahkannya, APBN harus menjadi alat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menjawab kebutuhan dasar rakyat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah sangat terbatas, sehingga kebijakan belanja negara harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran.

"APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang daya beli masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan di segala bidang; selalu memiliki ruang fiskal yang terbatas," jelasnya.

Dalam kondisi fiskal yang ketat, ia mendorong agar pemerintah menetapkan prioritas belanja secara efektif dan efisien. DPR RI pun, kata Puan, telah menyepakati pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) bersama pemerintah sebagai landasan penyusunan RAPBN 2026.

Puan berharap Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi sumber semangat dan optimisme nasional. Apalagi, di tengah situasi global yang tidak menentu, APBN bisa menjadi pendorong agar Indonesia semakin maju. "Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki arah yang jelas, memiliki harapan yang cerah, semangat bergotong royong, dan memiliki tekad untuk maju bersama-sama," serunya.

Puan menegaskan bahwa semua pihak harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dapat benar-benar mempermudah kehidupan rakyat, memperkuat pembangunan di daerah, dan menjadi simbol optimisme nasional di tengah ketidakpastian global.

 rnm/mh

Anggaran Pendidikan Capai Rp757 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran pendidikan dalam Rancangan RAPBN 2026 akan mengalami kenaikan 2,84 persen sampai 2,95 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika pada 2025 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp724,3 triliun, maka tahun 2026 akan menjadi Rp757 triliun.

realisasi anggaran tersebut telah didesain untuk tercapai di kisaran angka tersebut. Padahal, sisa dari anggaran yang tidak terserap itu diperkirakan mencapai Rp80 triliun - Rp100 triliun.

"Sisanya itu Rp80 triliun - Rp100 triliun. Ini kalau dimanfaatkan untuk mengefektifkan bidang pendidikan, sangat luar biasa. Mahasiswa kita 4 juta, 1 orang disubsidi Rp10 juta,



ANGGOTA

Banggar (Badan Anggaran) DPR RI, Marwan Cik Asan, menyoroti realisasi anggaran pendidikan yang tidak

pernah mencapai 20% dari APBN sebelumnya. Menurutnya, jatah tetap atau *mandatory spending* untuk dana pendidikan seringkali tidak terealisasi sepenuhnya.

"Realisasi APBN belanjanya berapa? 100,49%, artinya belanja tidak berkurang. Harusnya anggaran pendidikannya sama 20%, tidak berkurang. Justru realisasinya hanya 17%, ini *by design*, bukan tidak *by design*," ujar Marwan, dalam Rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat di Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Juli lalu. Pada tahun anggaran (TA) 2025 sendiri, pemerintah mengalokasikan dana Rp724,3 triliun untuk anggaran pendidikan. Sedangkan outlook realisasi anggaran pendidikan pada periode kali ini diproyeksikan sebesar 17,5%. Menurutnya, ini menunjukkan



Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPR RI, Marwan Cik Asan.

FOTO: MARIO/VEL

“

Pada tahun anggaran (TA) 2025 sendiri, pemerintah mengalokasikan dana Rp724,3 triliun untuk anggaran pendidikan.

Marwan Cik Asan
Anggota Banggar DPR RI

Rp40 triliun. Mau diperbesar Rp20 juta, 1 orang mahasiswa? Rp80 triliun, kalau seluruhnya untuk mahasiswa,” ujarnya.

Marwan menilai, kini sudah tidak bisa lagi pemerintah RI menggunakan pola lama, di mana postur 20% anggaran pendidikan sebagian besarnya ditempatkan di anggaran pembiayaan. Namun ujung-ujungnya, sisa dana tersebut tidak direalisasikan untuk kepentingan pendidikan itu sendiri.

Sementara itu, Anggota Banggar dari Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyoroti tentang besaran alokasi dana pendidikan untuk tahun 2026. Menurutnya, anggaran yang direncanakan di tahun depan belum sesuai dengan target-target yang diharapkan.

Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang semula sampai Rp50 triliun untuk tahun 2026, nanti menjadi hanya sebesar Rp33,65 triliun. Anggaran tersebut sudah termasuk untuk revitalisasi sekolah Rp9,5 triliun.

Ia juga menyoroti tentang besarnya alokasi anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya turut menyedot anggaran pendidikan. Adapun besaran anggaran MBG untuk tahun



Anggota Banggar dari Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati.

“

Anggaran pendidikan lebih baik dialokasikan untuk mendukung kebutuhan guru-guru PPPK hingga honorer yang belum jelas nasibnya.

MY Esti Wijayati
Anggota Banggar DPR RI

depan ditetapkan sebesar Rp217 triliun.

“Pembiayaan bagi pendidikan dasar yang itu berarti SD dan SMP, swasta maupun negeri sama sekali di

dalam kebijakan belanja pusat tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Dilihat dari mana? Dari besaran anggarannya, termasuk mohon izin, MBG itu juga menyedot anggaran pendidikan,” ujar Esti.

Esti juga minta penjelasan dari Kementerian Keuangan apakah betul anggaran MBG sebesar Rp217 triliun itu masuk sebagian besar di anggaran pendidikan. Padahal, menurutnya, anggaran pendidikan lebih baik dialokasikan untuk mendukung kebutuhan guru-guru PPPK hingga honorer yang belum jelas nasibnya.

“Jika saja keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini kemudian menjadi kebijakan kita, maka terkait dengan kesejahteraan guru, hak-hak yang mestinya diberikan kepada guru, itu bisa kita danai dengan angka 20% itu sejauh MBG tidak dimasukkan sebagai anggaran pendidikan,” kata dia. — **tn/mh**

Anggaran MBG Naik Tiga Kali Lipat

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan para wakil rakyat 15 Agustus lalu, menegaskan prioritas program sosial pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, jadi investasi jangka panjang untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Dalam RAPBN 2026, anggaran MBG dialokasikan sebesar Rp335 triliun, meningkat tiga kali lipat dibanding tahun berjalan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.



MERESPON hal tersebut, DPR RI akan mengawal ketat realisasi MBG agar berjalan tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles

Honoris menekankan bahwa dengan anggaran yang besar, pihaknya ingin memastikan penyerapannya tidak asal-asalan. "Apalagi tahun ini masih ada kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Tahun depan, Badan Gizi Nasional harus memperbaiki sistem agar makanan yang diberikan layak dan aman," tegasnya.

Sejalan dengan itu, MBG ditegaskan oleh Anggota Komisi IX Netty Prasetyani bukan sekadar program konsumsi, melainkan penggerak ekonomi rakyat. Dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal, MBG menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan pangan, sehingga masyarakat tidak hanya sehat, tetapi juga berdaya secara ekonomi.

Namun, wacana pemerintah mengalokasikan sebagian 20 persen APBN untuk program MBG dari dana pendidikan menuai catatan kritis. Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mempertanyakan apakah MBG bisa sepenuhnya dikategorikan sebagai dana pendidikan. Meski demikian, ia menegaskan DPR tetap akan memastikan anggaran pendidikan tepat guna, terutama untuk tunjangan guru, beasiswa, dan revitalisasi sekolah.

Selain MBG, program Sekolah Rakyat diproyeksikan pula sebagai investasi jangka panjang untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyambut baik pembangunan Sekolah Rakyat sebagai wujud keadilan sosial di dunia pendidikan. Sekolah

FOTO: GERALDI/VEL



Anggota Komisi IX Netty Prasetyani.



Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf.



Anggota Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani

“

MBG menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan pangan, sehingga masyarakat tidak hanya sehat, tetapi juga berdaya secara ekonomi.

Netty Prasetyani
Anggota Komisi IX DPR RI

Rakyat ditegaskannya hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapat akses pendidikan layak. Investasi ini memutus mata rantai kemiskinan.

Lalu juga menilai program Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah, serta distribusi 288.000 layar pintar sebagai lompatan besar untuk pemerataan akses pendidikan berkualitas. "Guru yang sejahtera, infrastruktur yang merata, dan

akses teknologi yang luas adalah pondasi generasi penerus bangsa," tambahnya.

Delapan dekade setelah proklamasi, Indonesia dihadapkan pada tantangan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata. Melalui MBG dan Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan arah pembangunan sosial, sementara DPR RI berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar setiap rupiah anggaran tepat sasaran.

Anggaran sosial dalam RAPBN 2026 bukan hanya soal besaran dana, melainkan wujud nyata

hadirnya negara di tengah rakyat. Dengan gizi yang terpenuhi dan pendidikan yang merata, Indonesia melangkah pasti menuju generasi emas, berdaulat, sejahtera, dan maju.

Sementara sektor pendidikan sendiri tetap mendapat alokasi anggaran 20 persen dari APBN. Ini rencananya digunakan untuk membangun 100 unit Sekolah Rakyat dan rencana tambahan 300 unit berikutnya. Revitalisasi besar-besaran infrastruktur sekolah juga akan dilakukan termasuk madrasah di seluruh Indonesia. **pun/mh**

“

Pembangunan Sekolah Rakyat sebagai wujud keadilan sosial di dunia pendidikan. Sekolah Rakyat ditegaskannya hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapat akses pendidikan layak.

Lalu Hadrian Irfani
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Mengganggu Program Koperasi Merah Putih

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi satu dari delapan agenda prioritas pada RAPBN 2026. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan 13 menteri, 3 kepala badan, serta seluruh kepala daerah untuk mendukung penuh Koperasi Merah Putih.



ADA polemik yang muncul bersamaan dengan pembiayaan Koperasi Merah Putih ini. Pemerintah diharapkan

tidak menggunakan dana desa yang dimiliki pemerintahan desa di semua daerah untuk membiayai program Koperasi Merah Putih ini.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyerukan pemerintah tidak

menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan, dana desa sudah memiliki peruntukan khusus dan tidak sepatutnya digunakan untuk menanggung pinjaman koperasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 serta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Jumat (15/8)

lalu. Dalam pidatonya Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah.

Timbul kekhawatiran penggunaan dana desa sebagai agunan. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto sendiri telah menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2025, yang salah satu isinya menjadikan dana desa sebagai talangan atas pinjaman Koperasi Desa Merah Putih.



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

FOTO: OJI/VEL



"Nah di sini mungkin titik yang saya agak kurang setuju. Kurang setuju menjadikan dana desa sebagai beban untuk pinjaman koperasi dari Bank Himbara. Harusnya kalau memang kita mau bangun koperasi ya sudah, itu pure untuk koperasi saja jangan mengganggu dana desa, karena dana desa sudah ada peruntukannya," jelas Lasarus. Menurutnya, skema tersebut justru bisa menambah beban bagi kepala desa yang selama ini menghadapi banyak persoalan di tingkat lokal. Ia mengingatkan, risiko politisasi sangat mungkin terjadi jika program Koperasi Merah Putih menggunakan dana desa sebagai penjamin pinjaman.

"Berarti, kan, kita mengalihkan beban, memberi beban yang lebih berat lagi kepada pemerintahan desa dengan seluruh persoalan yang ada sekarang. Yang saya khawatirkan ke depan ini bisa dipolitisasi," ujar legislator Dapil Kalimantan Barat II itu. Lasarus menambahkan, koperasi seharusnya memiliki pengurus

dan anggota yang jelas. Dengan menjadikan dana desa sebagai penjamin, seluruh warga akan otomatis dianggap sebagai anggota koperasi meski modal yang tersedia terbatas.

"Koperasi sejatinya harus jelas pengurusnya siapa, anggotanya siapa. Nah, sekarang kalau menggunakan dana desa sebagai penjamin, berarti seluruh masyarakat itu adalah anggota koperasi. Kalau seluruh masyarakat anggota koperasi hanya modal 3 miliar, pertanyaan saya mampukah untuk satu masyarakat misalnya jumlah penduduknya mencapai 3.000–5.000 orang?" ucapnya.

Ia pun meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam merancang program yang melibatkan uang negara. Lasarus menekankan, setiap rupiah dana publik wajib dipertanggungjawabkan sesuai kaidah keuangan negara. "Komentar saya sampai di situ dulu, tapi saya minta pemerintah berhati-hati, karena

ada penggunaan uang negara di sini. Pertanggungjawaban keuangannya harus tetap mengacu kepada kaidah-kaidah keuangan negara," pungkasnya.

Pemerintah telah menerbitkan aturan baru yang memungkinkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengakses pinjaman hingga Rp3 miliar dari bank Himbara dengan bunga tetap 6 persen per tahun dan tenor enam tahun. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun

“

Pemerintah lebih berhati-hati dalam merancang program yang melibatkan uang negara. Lasarus menekankan, setiap rupiah dana publik wajib dipertanggung jawabkan

Lasarus
Ketua Komisi V DPR RI

2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dukungan itu diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 yang membuka ruang penggunaan dana desa sebagai talangan. Pasal 4 butir 4 regulasi tersebut mengizinkan pemerintah desa memberikan dukungan pengembalian pinjaman maksimal 30 persen dari dana desa apabila koperasi tidak mampu melunasi kewajiban kepada bank.

tn/mh

RAPBN 2026



DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**



Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2026



Pertumbuhan ekonomi
ditargetkan mencapai
5,4 persen



Suku bunga SBN di
kisaran 6,9 persen



Tingkat Pengangguran terbuka
ditargetkan turun ke 4,44 – 4,96
persen



Rasio Gini turun ke 0,377 – 0,380



Indeks kesejahteraan petani dan
penciptaan lapangan kerja formal
ditargetkan meningkat



Inflasi terkendali di level 2,5 persen
Nilai tukar berada di kisaran Rp
16.500/USD



Angka kemiskinan turun ke 6,5 –
7,5 persen



Indeks Modal Manusi sebesar 0,57

8 AGENDA PRIORITAS RAPBN 2026



Ketahanan Pangan

Rp 164,4 triliun



Ketahanan Energi

Rp 402,4 triliun



Makan Bergizi Gratis

Rp 335 triliun



Pendidikan Bermutu

RP 757,8 triliun

(Anggaran pendidikan ini cetak rekor terbesar sepanjang secara) yang diperuntukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah/kampus sebesar Rp 150,1 triliun, Memperkuat kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen sebesar RP 178,7 triliun., Beasiswa bagi siswa/mahasiswa program Indonesia pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa., Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa., Tunjangan profesi guru non-pns dan tunjangan profesi guru AS daerah., Menargetkan penerima beasiswa LPDP 2026 sebanyak 4000 mahasiswa



Pelayanan Kesehatan Berkualitas Yang Adil Dan Merata

Rp 224 triliun

Terdiri dari Cek kesehatan gratis, peningkatan fasilitas kesehatan, pengendalian penyakit menular, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mempercepat penurunan stunting dan revitalisasi rumah sakit



Penguatan Koperasi

Desa/Kelurahan Merah Putih



Penguatan Pertahanan

Semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa



Percepatan Investasi

Dan Perdagangan Global

RANCANGAN RAPBN 2026



BERSATU BERDAULAT
RAKYAT SEJAHTERA
INDONESIA MAJU



Belanja negara dialokasikan

Rp 3.785,5 triliun



Pendapatan negara ditargetkan

mencapai Rp 3.147,7 triliun



Defisit PABN dirancang

Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable

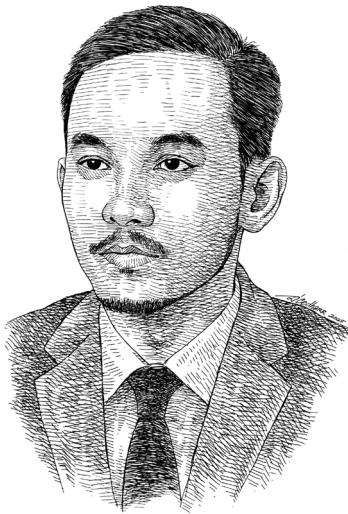


Pengembangan

pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga tidak hanya mengandalkan APBN



APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan



Oleh:

Tharriq Arrahman

Analisis kebijakan Bagian kelembagaan
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Jakarta

RAPBN 2026

Janji Kesejahteraan dalam Belanja Triliunan

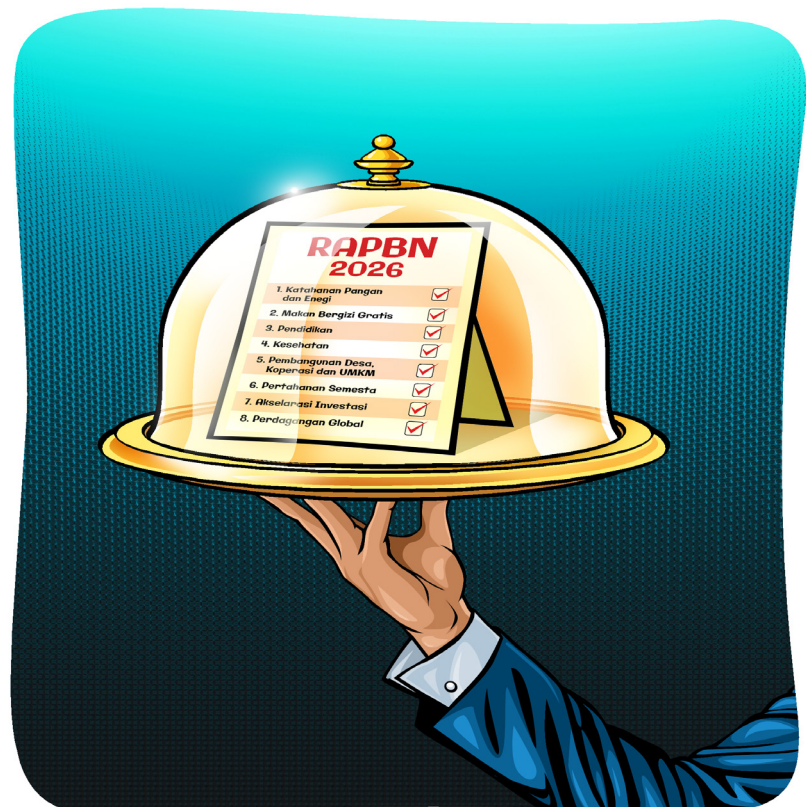
kisaran 5,2–5,8 persen dengan inflasi terjaga di rentang 1,5–3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS dan imbal hasil SBN 10 tahun berada pada level 6,6–7,2 persen. Postur asumsi dasar ekonomi makro tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator pembangunan yang telah ditetapkan, seperti menurunkan

tingkat kemiskinan menjadi 6,5–7,5 persen dan kemiskinan ekstrem hingga 0–0,5 persen, menjaga rasio gini pada kisaran 0,377–0,380, serta mengendalikan tingkat pengangguran terbuka di level 4,44–4,96 persen dan mendorong proporsi penciptaan lapangan kerja formal hingga 37,95 persen.

Sekilas proyeksi asumsi dasar RAPBN 2026 ini mencerminkan pendekatan yang berupaya

Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 membawa kita pada ruang diskusi yang menarik antara optimisme fiskal dan realitas pelaksanaan kebijakan yang membuka mata publik pada suatu titik krusial, ketika kepentingan fiskal, politik, dan sosial-ekonomi bertemu dan saling memengaruhi dalam menentukan arah pembangunan Indonesia. Pada tahapan rencana anggaran ini, RAPBN 2026 tidak hanya dipandang sebagai dokumen formal yang memuat angka-angka proyeksi dan perhitungan makro-ekonomi saja, melainkan sebagai representasi dari arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah dalam setahun mendatang.

Berdasarkan Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada



menjaga keseimbangan antara optimisme pertumbuhan dan kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi global dan juga termasuk mempertimbangkan gejolak harga komoditas dan kebijakan moneter negara super power. Tetapi rentang kendali yang cukup lebar ini juga mengisyaratkan bahwa pencapaian target masih bergantung pada dinamika eksternal yang sulit dikendalikan. Memang persoalan fleksibilitas perlu diperhatikan, namun jika fleksibilitas terlalu lebar dapat menimbulkan persepsi bahwa pencapaian target dapat dinegosiasikan ulang sewaktu-waktu, dan pada akhirnya menguji kredibilitas perencanaan fiskal itu sendiri. Oleh karena itu, pengendalian ketat terhadap asumsi dasar ini harus di kawal melalui mekanisme evaluasi berkala, agar ruang fleksibilitas tidak bergeser menjadi celah ketidakpastian.

Di tengah kerangka asumsi makro yang menuntut kehati-hatian tersebut, pemerintah menempatkan APBN 2026 sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menjadi kendaraan untuk menerjemahkan visi politik pemerintahan. Penekanan pada program agenda prioritas ini sejalan dengan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025.

Berdasarkan isi Pidato Presiden Republik Indonesia, bapak Prabowo Subianto memperkuat dan mempertajam rancangan anggaran ini menjadi 8 (delapan) agenda prioritas yang mencakup: perwujudan ketahanan pangan sebagai fondasi

kemandirian bangsa, memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa, membangun generasi unggul melalui program makan bergizi gratis (MBG), mewujudkan pendidikan yang bermutu, menghadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata melalui pemeriksaan kesehatan secara gratis, menargetkan pembentukan 80 (delapan puluh) ribu Koperasi Merah Putih untuk menghidupkan perekonomian rakyat, memperkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa, dan percepatan investasi dan perdagangan global melalui Danantara. Program-program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Namun, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa daftar program yang terlihat runut dan solid di atas kertas belum tentu berhasil sepenuhnya ketika diimplementasikan.

Ambisi besar tersebut berjalan bersamaan dengan postur belanja negara yang diproyeksikan menembus hingga Rp3.786,5 triliun atau setara 14,19–14,83 persen PDB, dengan defisit berada pada kisaran 2,48 persen PDB. Postur belanja negara ini dinilai melonjak cukup signifikan sekitar 9,8 persen dibanding outlook tahun sebelumnya. Di tengah ancaman pelebaran defisit dan tekanan fiskal akibat beban utang yang terus meningkat, keputusan pemerintah menaikkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp71 triliun pada APBN tahun anggaran 2025 menjadi Rp335 triliun dalam RAPBN 2026 bukan hanya agresif, tapi nyaris sembrono.

Dalam konteks tata kelola fiskal di Indonesia, kenaikan anggaran MBG dalam RAPBN 2026 sulit dilepaskan dari aroma populisme fiskal, karena janji politik saat kampanye kini dibungkus dengan retorika pembangunan sumber

daya manusia. Masalahnya, program sebesar ini sampai sekarang belum memiliki model implementasi yang jelas terkait bagaimana mekanisme distribusi makanan setiap hari untuk 82,9 juta siswa, balita, dan ibu hamil bisa berjalan efektif di tengah birokrasi yang lamban, disparitas kapasitas antarwilayah yang tinggi, serta pengadaan yang rawan akan praktik mark-up. Risiko korupsi, kolusi, hingga penurunan kualitas pangan di lapangan justru lebih besar ketimbang manfaat yang dijanjikan. Ironisnya, program ini diklaim akan memperkuat UMKM dan ekonomi rakyat, tetapi pemerintah bahkan belum menyiapkan skema perlindungan bagi vendor lokal yang bisa saja bangkrut hanya karena keterlambatan pembayaran. Jika problem mendasar ini tidak dijawab, MBG berpotensi menjadi proyek ambisius yang menyedot anggaran ratusan triliun, namun gagal menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal besarnya angka anggaran, melainkan juga menyangkut kesiapan negara dalam mengelola program sosial berskala raksasa dengan tata kelola yang transparan dan berkeadilan. Tanpa adanya desain kebijakan yang detail, skema distribusi yang mampu menjawab persoalan disparitas antarwilayah, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi. Lonjakan anggaran ini justru akan berisiko menambah daftar panjang kegagalan negara dalam mengelola belanja publik, karena keraguan publik tidak akan lahir tanpa alasan, sebab pengalaman pahit terkait adanya sejarah korupsi pengelolaan program bantuan sosial yang justru memperlihatkan betapa rapuhnya pengawasan dan akuntabilitas, bahkan dalam program yang anggarannya lebih kecil dari program MBG ini. 🐸



Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat menerima laporan terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Gedung Nusantara II.

BP Haji Naik Kasta Jadi Kementerian

Seiring disahkannya UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, muncul nomenklatur baru dalam urusan haji. Badan Penyelenggara (BP) Haji kini naik kasta menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Harapan besar tentu saja muncul, penyelenggaraan haji dan umrah jadi lebih efektif, murah, dan berkualitas.

Apresiasi disampaikan para anggota DPR RI menyambut perubahan ini, saat Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan

RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8/2019 menjadi UU, 26 Agustus lalu. Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal itu, secara

aklamasi menyetujui UU hasil revisi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, dalam laporannya di hadapan rapat menjelaskan, RUU Haji dan Umrah mengatur peningkatan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan bagi jemaah selama di tanah air dan tanah suci. Langkah ini untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan di Arab Saudi.

Lebih lanjut Marwan memaparkan, Panja Komisi VIII DPR dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati empat hal. *Pertama*, dibentuk lembaga penyelenggara ibadah haji dan umrah setingkat kementerian. *Kedua*, Kementerian Haji dan Umrah berada dalam satu atap terkait semua hal tentang penyelenggaraan haji dan umrah. *Ketiga*, seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Keempat, keadilan dan kemudahan jemaah haji dan umrah diatur melalui konstruksi UU yang terdiri dari judul, konsideran, 16 bab, dan 130 pasal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar, menyampaikan apresiasi atas peningkatan kelembagaan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah sebagaimana disampaikan dalam Pandangan Akhir Presiden atas RUU tersebut. Ansory melihat, langkah perubahan ini merupakan capaian penting dalam upaya negara memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

"PKS menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Selama ini banyak persoalan yang kita hadapi terkait kuota, pembinaan jemaah, hingga perlindungan jemaah non-kuota. Dengan status kelembagaan yang lebih kuat, pelayanan kepada jemaah *insyaallah* bisa lebih terintegrasi, profesional, dan akuntabel," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, akhir Agustus silam.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mewakili presiden menyampaikan pandangan akhir pemerintah. Salah satu poin pentingnya

adalah penguatan kelembagaan penyelenggara haji dengan mengubah BP Haji menjadi kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah.

Ansory menambahkan, pembentukan kementerian ini diharapkan tidak sekadar perubahan nomenklatur, tetapi benar-benar menghadirkan ekosistem pelayanan haji dan umrah yang menyeluruh. "Kami berharap Kementerian Haji dan Umrah nantinya mampu memperkuat sistem informasi, memanfaatkan kuota tambahan secara optimal, hingga memastikan jemaah kita berangkat dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai syariat. Intinya, ini soal perlindungan hak asasi umat Islam untuk beribadah," tegasnya.

PKS, lanjut Ansory, akan terus mengawal implementasi UU baru ini agar benar-benar berpihak pada kepentingan jemaah. "RUU ini sudah kita sahkan bersama. Kini, tugas kita adalah memastikan agar semangat perubahan ini dirasakan langsung oleh jutaan calon jemaah haji dan umrah Indonesia. PKS *insyaallah* akan berada di garda terdepan untuk mengawalnya," pungkas Ansory.

rdn/mh



Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, saat menyampaikan laporan RUU Haji dan Umrah pada Rapat Paripurna.

DPR Desak Mitigasi dan Diversifikasi Pasar Ekspor

Kebijakan penerapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang dunia. Keadilan global pun terusik. Banyak negara melakukan negosiasi ulang dengan pemerintah AS. Bahkan, China sedang membangun jaring dagang baru dan menyepakati perjanjian dagang dengan negara-negara di Asia.



Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.

Indonesia termasuk yang terdampak dengan kebijakan tarif impor AS itu. Indonesia dipatok tarif impor 19 persen. Ini tentu saja merugikan bagi perdagangan internasional Indonesia. DPR RI pun ikut angkat bicara soal ini. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan tarif impor sebesar 19 persen untuk produk Indonesia bukanlah prestasi yang patut disyukuri.

Menurutnya, meski tarif tersebut lebih rendah dari ancaman awal sebesar 32 persen, keputusan itu tetap merupakan bentuk pembebanan sepihak oleh negara kuat. "Kalau kita katakan patut disyukuri, tidak benar juga. Ini pembebanan. Tapi, setidaknya kita berhasil menurunkan dari 32 jadi 19 persen," ujar Said di Gedung DPR, pertengahan Juli silam.

Said mengatakan, praktik sepihak semacam ini bisa menjadi preseden buruk yang mengikis prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perdagangan internasional. "Jika negara kuat terus menggunakan kebijakan sepihak sebagai alat dagang, maka keadilan dan equality akan terus tergerus," ujarnya.

FOTO: DEP/VEL

Ia juga menilai langkah Presiden Trump murni ditujukan untuk menambal defisit anggaran AS, namun akan berdampak negatif bagi konsumen di dalam negeri Amerika sendiri. Meski demikian, ia tetap memberi apresiasi terhadap upaya lobi diplomatik Indonesia yang berhasil menekan tarif hingga di bawah 20 persen.

Dalam konteks lebih luas, Said mengingatkan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan ini terhadap neraca perdagangan Indonesia. "Dulu kita bisa surplus sampai USD 17 miliar, sekarang mari kita lihat, berapa sisa surplus setelah tarif ini berlaku," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Lebih jauh, Said juga menyesalkan lemahnya peran organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia dalam merespons dominasi negara besar. "Mereka seperti mati suri. Semua negara dipaksa bernegosiasi sendiri-sendiri oleh AS, padahal kita butuh perlindungan multilateral," ujarnya.

Ia mendorong agar Indonesia menjadikan keanggotaan BRICS sebagai alat penyeimbang, namun dengan kewaspadaan agar BRICS tidak berubah menjadi lembaga



Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera.

hegemonik seperti IMF. "Kalau BRICS ke depan jadi sama saja, ya bohong juga buat kita," tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, justru menilai kebijakan penurunan tarif tersebut sebagai peluang. Ia menyebut Indonesia harus cerdas memanfaatkan celah dengan menggeser rantai pasok dan meningkatkan ekspor ke AS.

"Ini peluang. Kalau tarif kita lebih rendah dari Vietnam, Thailand, dan China, kita bisa rebut pasar mereka,"

kata Kamrussamad. Ia juga menyoroti perlunya kejelasan hukum terkait rencana impor minyak dari AS agar tidak menimbulkan risiko hukum bagi pelaku usaha.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera juga memandang kesepakatan tarif sebagai langkah strategis di tengah ketidakpastian global. "Keputusan ini bukan diambil gegabah, tapi hasil perhitungan di tengah tekanan ekonomi global," katanya.

Namun ia mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran negara secara disiplin agar belanja negara tetap berdampak positif, termasuk pembelian pesawat Boeing yang dinilainya tepat sasaran dalam memperkuat ketahanan dan daya saing nasional. Mardani menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara. Ia menyoroti potensi besar dari kerja sama dengan BRICS serta penyelesaian perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

"Langkah memperluas pangsa ekspor ke negara mitra strategis adalah keniscayaan. Kita harus menjawab tantangan global dengan strategi yang adaptif dan pro-rakyat," tegasnya. ssb/mh



Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad

UU Haji

Layanan Jemaah Akan Lebih Terintegrasi



Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin rapat

Pada Rapat Paripurna ke-4 Agustus lalu menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Layanan haji diharapkan kian paripurna dan terintegrasi.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa pengajuan RUU ini merupakan usul inisiatif Komisi VIII DPR RI sebagai respons atas kebutuhan peningkatan pelayanan jemaah, penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan Arab Saudi, serta

kebutuhan hukum setelah Presiden RI menetapkan pembentukan badan penyelenggara khusus.

"Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah bersepakat kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini akan menjadi one stop service, mengoordinasikan seluruh urusan penyelenggaraan

ibadah haji dan umrah, baik terkait infrastruktur, SDM, maupun pelayanan jemaah," ungkap Marwan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan konstruksi UU ini terdiri atas 16 bab dengan 130 pasal, mengatur mulai dari ketentuan umum, jemaah haji, biaya penyelenggaraan, kelompok bimbingan, penyelenggaraan haji reguler maupun khusus, umrah, koordinasi, kelembagaan, pendidikan, keadaan darurat, hingga ketentuan pidana, dan peralihan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, disahkannya UU ini, membawa konsekuensi penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pembentukan kementerian baru. Dasco menegaskan, DPR hanya menjalankan fungsi legislasi dengan menyelesaikan revisi UU, sementara

implementasi lebih lanjut berada di ranah eksekutif. Menurutnya, keputusan terkait penambahan maupun penggabungan kementerian sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan, kelembagaan Badan Pengelola Haji (BP Haji) telah resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah, sebagaimana disampaikan dalam Pandangan Akhir Presiden atas RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8

“

Disahkannya UU ini, membawa konsekuensi penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pembentukan kementerian baru

Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ansory menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan capaian penting dalam upaya negara memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

"Kami menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Selama ini banyak persoalan yang kita hadapi

terkait kuota, pembinaan jemaah, hingga perlindungan jemaah non-kuota. Dengan status kelembagaan yang lebih kuat, pelayanan kepada jemaah insyaallah bisa lebih terintegrasi, profesional, dan akuntabel," ujar politisi Fraksi PKS itu.

Ansory menambahkan, pembentukan kementerian ini diharapkan tidak sekadar perubahan nomenklatur, tetapi benar-benar menghadirkan ekosistem pelayanan haji dan umrah yang menyeluruh. Ansory menegaskan akan terus mengawal implementasi undang-undang baru ini agar benar-benar berpihak pada kepentingan jemaah haji Indonesia.

"Kami berharap Kementerian Haji dan Umrah nantinya mampu memperkuat sistem informasi, memanfaatkan kuota tambahan secara optimal, hingga memastikan jemaah kita berangkat dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai syariat. Intinya, ini soal perlindungan hak asasi umat Islam untuk beribadah," tegasnya. we/mh



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar.

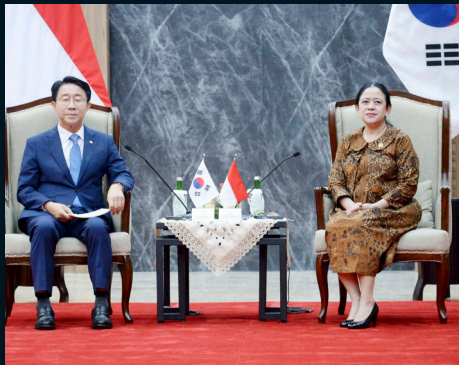


Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR- DPD RI dalam rangka HUT ke-80 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). FOTO: TIM/ANDRI



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima kunjungan Delegasi Utusan Khusus Presiden Republik Korea, Cho Jeong-Sik, Seo Young-Kyo, dan Lee Jae-Gang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

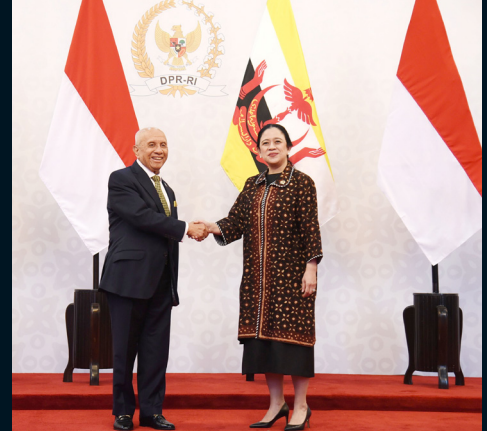
FOTO: MARIO/ANDRI





Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste, Maria Fernanda Lay di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

FOTO : GERALDI/ANDRI



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Pondok Pesantren Sa'adatuddaroin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (17/8/2025). FOTO : TONDA/ANDRI

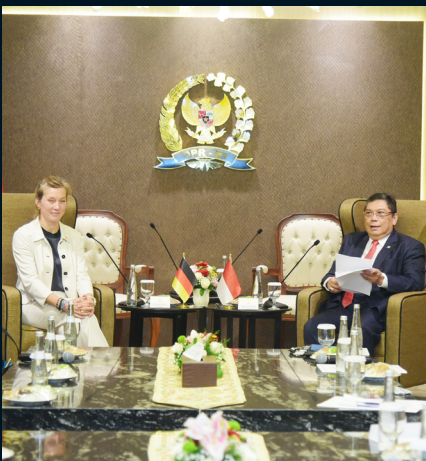




Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat menetapkan calon hakim konstitusi dalam Rapat Paripurna di DPR, Senayan, Kamis (21/8/2025). FOTO: JAKA/ANDRI



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat konferensi pers. DPR RI bersama seluruh pemangku kepentingan sepakat menjaga iklim dunia musik tetap kondusif sekaligus mempercepat penyelesaian revisi Undang-Undang Hak Cipta di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). FOTO: RUNI/ANDRI



Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, serta anggota menerima kunjungan Parlemen Jerman di Ruang Delegasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). FOTO: OJI/ANDRI



Komisi IV DPR RI dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, saat menerima audiensi pengurus DPN APTRI di Gedung DPR, RI Kamis (21/8/2025). FOTO: OJI/ANDRI



Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, di dampingi anggota BAM DPR RI saat melakukan RDPUR dengan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Ruang Rapat BAM DPR RI, Rabu (20/8/2025). FOTO: TARI/ANDRI



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat menyampaikan pidato dalam upacara memperingati HUT ke-80 RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Foto : Oji, Runi, Tari dan Munchen/Andri



Sugiat Santoso

Menjaga Mandat, Menjaga Nurani



Dari jalanan berdebu di Langkat hingga ruang-ruang rapat Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso tak pernah benar-benar meninggalkan akar perjuangannya. Anak petani yang dulu menenteng buku sambil membajak sawah, kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, dengan satu tekad, membela mereka yang tak mampu bersuara.

Dirinya lahir dari keluarga petani sederhana, anak kesembilan dari sepuluh bersaudara. Masa kecilnya adalah serangkaian kerja keras mulai dari membajak sawah, panen padi, menyadap pohon karet, dan menanam palawija. Di tengah keterbatasan, orang tuanya tidak takut menanamkan mimpi yang tinggi kepada anak-anaknya, sekolah setinggi-tingginya.

Menempuh perjalanan sepanjang lima kilometer dengan berjalan kaki, Sugiat dengan sepasang sepatu dan seragam lusuh berangkat menuju SDN 2 Kuala. Setiap hari, ia menempuh rute yang sama, melewati rawa, jalan tanah, dan bau karet yang menempel di udara.

"Bapak saya tidak tamat SR (Sekolah Rakyat), tapi bapak selalu bilang anak-anak harus sekolah setinggi-tingginya. Saya bahagia ke sekolah, walaupun harus jalan kaki

jauh. Membantu orang tua di sawah membahagiakan, tapi sekolah seperti pelarian saya untuk mengejar cita-cita," kenangnya.

Tak semua saudara Sugiat berhasil melanjutkan pendidikan. Pada akhirnya, Sebagian mengalah memilih tinggal di ladang demi menyekolahkan yang lain. Dirinya beruntung bisa melanjutkan ke Fakultas Teknik Industri di Universitas Sumatera Utara walaupun tidak berjalan mulus.

Sepanjang tahun 1997–1998, Indonesia bergejolak. Rezim Orde Baru mulai keropos. Mahasiswa turun ke jalan. Sugiat, yang aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), larut dalam gelombang perlawanan. Ia turun berdemonstrasi, menghadiri diskusi politik, dan mendalami ideologi. "Saya kena DO karena terlalu sering demo," katanya sambil tertawa kecil.

Baginya, konsekuensi ini bukan kegagalan, namun adalah sebuah pilihan. Keberanian ini lahir bukan tanpa alasan. Di dalamnya tersimpan luka lama, tanah milik keluarganya dirampas oleh perkebunan negara tanpa proses adil. Ayahnya sempat ditahan lantaran mengorganisasi para petani untuk memprotes perampasan. "Tak ada yang membela kami waktu itu. Saya janji, saya harus sekolah tinggi dan jadi aktivis agar bisa bela orang-orang tertindas," ujar Sugiat.

Tambal Mimpi, Bangun Jalan Baru

Usai dikeluarkan oleh kampus, Sugiat tidak berhenti belajar. Ia memutuskan pindah ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AL-Hikmah, kuliah sembari bekerja hingga akhirnya berhasil menjadi Sarjana Ekonomi pada tahun 2009. "Sejak tamat SMA dan merantau untuk kuliah, Saya memang berusaha sekuat tenaga untuk mandiri agar tak menyusahkan orang tua, usaha serabutan, jadi tentor, jualan kue,

apa saja yang penting bisa bertahan," ungkapnya.

Pendidikan bukan sekadar pencapaian bagi Sugiat. Baginya, pendidikan tinggi adalah "utang kepada orang tua" yang harus dituntaskan. Setiap ijazah adalah bentuk bakti dan bekal untuk memperjuangkan keadilan lebih luas.

Tidak heran, ia bergegas melanjutkan studi sekaligus berhasil menyelesaikan magister program Studi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012. Kini, ia tengah menempuh program doktor di bidang yang sama. Namun, tak disangka, tahun 2008 menjadi titik balik hidup Sugiat Santoso. Ketika Partai Gerindra baru saja dideklarasikan, ia sebagai aktivis muda HMI dan pemuda Sumatera Utara didekati langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad, politisi senior Gerindra.

Dasco melihat sesuatu dalam diri Sugiat yang layak dalam dunia politik mulai dari daya tahan, militansi, dan arah pikir jernih yang tumbuh dari jalanan. "Bang Dasco yang mengajak dan mengkader saya sejak bergabung ke Gerindra. Beliau mentor saya sejak awal," tuturnya.

Ajakan itu, bagi Sugiat, adalah transformasi total. Ia terjun sebagai perintis Gerindra di Sumatera Utara mulai dari menyusun struktur, menghadapi dinamika internal, dan bertahan saat tak sedikit yang berpaling. Kesetiaan, baginya, bukan perkara jabatan melainkan adalah sebuah janji, seperti janji yang ditanam di ladang kampungnya, dibentuk di barisan demonstrasi, dan ditempa dalam kelas-kelas malam yang ia lalui sambil bekerja.

Sebelum menjadi wakil rakyat di DPR RI, Sugiat sempat berkarier menjadi Wakil Ketua Yayasan di BUMD PRSU (Pekan Raya Sumatera Utara) selama empat tahun, mengelola agenda ekonomi dan promosi daerah. Usai Pilpres 2019, ia diangkat sebagai komisar di PT Prima Multiterminal, anak perusahaan



Kenangan masa sekolah

Pelindo. Ia terpilih berdasarkan penunjukan Menteri BUMN Erick Thohir.

Putar arah, pada tahun 2024, Dasco meminta Sugiat maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI. Ia sempat ragu. Kariernya di BUMN mapan, hidup sudah tenang, namun perintah dari sang mentor tidak bisa ia tampikan. "Saya tinggalkan semua, dan maju (caleg)," katanya. Tahun 2024, ia pun lolos ke Senayan dan langsung dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, yang membidangi hukum, HAM, dan pertahanan sipil. "Kata orang, ini komisi air mata karena tiap hari kami dengar keluh kesah rakyat," ungkap Sugiat.

Dari Rakyat, Untuk Rakyat

Sugiat tidak membawa gaya elite ke dalam setiap pekerjaannya,



Sugiat Santoso saat di tengah masyarakat dalam giat dapil.



namun etos aktivis yang menjadi semangatnya. Setiap kembali ke daerah pemilihan, dirinya nongkrong di warung kopi untuk mendengar setiap aspirasi dan aduan warga setempat. "Saya terima siapa saja (yang datang ke warung kopi, dari pagi sampai malam. Saya tanya satu per satu, masalahnya apa. Kita bantu yang bisa, cari jalan keluar bersama," tuturnya.

Dirinya mengaku lebih memilih kerja nyata ketimbang pencitraan. Maka dari itu, ia terbiasa mengadvokasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yang bahkan luput dari sorotan media. Meski kini menjabat di lembaga tinggi negara, dirinya tidak ingin sibuk membangun citra di media sosial.

"Bukan karena enggak bisa (membangun citra di media sosial), tapi karena saya ingin fokus pada substansi. Viral itu dampaknya paling dua minggu tapi keadilan punya dampak yang jauh lebih panjang (waktunya). Kita lihat (ada) kasus yang bikin frustrasi. Orang melapor karena dianiaya, malah dia yang ditangkap. Di situlah kita bilang, kekuasaan ini brengsek, karena tidak berpihak pada keadilan," jelas Sugiat.

Bagi Sugiat, perjuangan bukan

tentang sorotan kamera, bukan tentang seberapa sering muncul di media, namun soal dampak nyata. "Saya percaya, kebaikan yang kecil pun, kalau tulus, akan dibalas Tuhan. Pun, kita juga ingat bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban, bukan di hadapan publik, tapi di hadapan Tuhan," terangnya.

Di sisi lain, dirinya menaruh perhatian serius pada pembentukan karakter generasi muda. Di tengah hingar-bingar teknologi dan cepatnya arus digitalisasi, ia justru menaruh perhatian pada hal yang seringkali terabaikan, pembentukan karakter generasi muda. Baginya, visi Indonesia Emas 2045, yang selama ini digaungkan pemerintah sebagai tonggak menuju 100 tahun kemerdekaan, tidak akan berarti jika generasi penerusnya rapuh secara nilai dan mentalitas.

"Indonesia Emas itu bukan hanya soal ekonomi dan teknologi. Itu soal siapa yang akan memegang tanggung jawab masa depan bangsa ini. Apakah mereka siap secara karakter, secara ideologi, secara etika?" ujarnya dengan nada serius. Ia menegaskan, generasi muda hari ini memang lebih adaptif terhadap teknologi, tetapi itu bukan jaminan

mereka siap memimpin bangsa.

"Kalau soal teknologi, itu bisa dipelajari tapi soal integritas, soal keberpihakan, soal nasionalisme, itu butuh proses pembentukan yang panjang dan konsisten," jelasnya. Menurutnya, pendidikan nasional perlu kembali ke akar, tidak hanya mencetak lulusan cerdas, akan tetapi juga membentuk manusia berkarakter. Ia tidak ingin arah pendidikan menjadi terlalu fokus pada aspek teknis dan kognitif, yang mengabaikan pembinaan nilai kebangsaan.

Sebab itu, Sugiat menyambut baik arah kebijakan yang menempatkan kembali ideologi dan nasionalisme sebagai pilar dalam sistem pendidikan. Ia menyebut sosok Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang memiliki kesadaran sejarah dan memahami pentingnya pembentukan watak kebangsaan. "Pak Prabowo tahu, tidak ada negara besar di dunia yang dibangun tanpa karakter kuat dari rakyatnya," tegasnya.

Di tengah godaan pragmatisme dan gaya hidup instan yang melanda generasi muda, Sugiat menekankan pentingnya keteladanan dari para pemimpin. Ia sendiri berusaha menjaga idealismenya dengan hidup sederhana, membatasi pencitraan, dan tetap berpegang pada nilai. "Kalau pemimpin saja kehilangan arah, bagaimana anak muda bisa



punya arah?" tanyanya.

Menurutnya, mempersiapkan generasi muda untuk Indonesia Emas bukan sekadar agenda pembangunan. Ia menyebutnya sebagai pertarungan peradaban. Tanpa karakter, ungkapnya, bangsa ini bisa tumbuh secara infrastruktur tapi runtuh dari dalam. Maka, menurutnya, pendidikan karakter, ideologi, dan nasionalisme bukan pilihan. Itu keharusan sejarah.

Pandangan-pandangannya ini yang menjadi alasan mengapa ia dianugerahi penghargaan Sahabat Pers dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) Medan. Penghargaan itu bukan sekadar simbol kedekatan dengan media, melainkan pengakuan atas konsistensinya menjadikan pers sebagai mitra perjuangan, bukan alat pencitraan. "Sejak zaman aktivis, saya selalu kerja bareng teman-teman jurnalis," ujarnya.

Baginya, pers adalah pilar penting demokrasi karena menjadi mata, telinga, dan suara masyarakat. Dalam banyak kasus advokasi, ia kerap berada di belakang layar, mendorong isu-isu publik agar mendapat perhatian media. "Banyak kasus saya bantu angkat, bahkan tanpa harus muncul nama saya, yang penting kasusnya tersuarakan, korban dibela, dan kekuasaan ditekan agar bertindak," tuturnya.

Sugiat memahami betul

kekuatan narasi. Ia menyadari, dalam sistem politik yang kadang tumpul terhadap nurani, tekanan publik lewat pemberitaan bisa jadi satu-satunya cara untuk menggerakkan birokrasi atau aparat. Maka ia memilih membangun hubungan yang organik dan jujur dengan media. Ia tidak melihat wartawan sebagai corong kekuasaan, tapi sebagai rekan seperjuangan.

Buku dan Jalan Pulang

Di tengah padatnya agenda parlemen, rapat komisi, hingga reses ke daerah, Sugiat tetap menyisihkan waktu untuk satu kebiasaan lama yang enggan ia tinggalkan, membaca. Baginya, buku bukan sekadar pelarian dari rutinitas politik yang melelahkan, tetapi alat untuk menjaga nalar tetap hidup dan hati tetap tajam.

Genre favoritnya adalah sejarah. Di dalam tas kerja yang selalu ia bawa, terselip satu buku yang tengah ia baca, *The Mandate of Heaven*: Seni Memimpin tanpa Memimpin, karya William Win Yang. Meski disebut novel, buku itu sarat muatan politik dan refleksi sejarah. Buku itu, menurut Sugiat, menggambarkan

bagaimana kekuasaan dalam sejarah selalu bergantung pada satu hal, legitimasi moral.

Bagi Sugiat, membaca sejarah adalah cara untuk mengingatkan diri bahwa kekuasaan selalu sementara. Itu pula yang menjaga idealismenya tetap waras di tengah hiruk-pikuk Senayan. Ia tahu, banyak yang datang ke parlemen membawa semangat, lalu pulang dengan kemewahan dan lupa tujuan.

Menutup cerita, Sugiat memiliki satu ruang yang tidak pernah berubah dalam kehidupannya yakni keluarga. Ia bersyukur bisa mendampingi anak-anaknya tumbuh dalam pendidikan yang layak, sesuatu yang dulu hanya ia impikan ketika masih berjalan kaki menembus kabut ladang di Langkat.

Dirinya tak memaksa mereka masuk politik, tetapi diam-diam berharap mereka tumbuh dengan semangat kepemimpinan dan rasa peduli terhadap sesama. Ia berusaha tak mewariskan trauma, namun semangat berjuang yang ingin ia tanamkan. "Kalau saya dulu belajar dari kekurangan, anak-anak saya hari ini belajar dari cerita," tutup Sugiat.

um/mh



Bersama keluarga tercinta.

Menjadikan UNHAN Kampus Unggulan

Pemerintah terus berkomitmen menjadikan Universitas Pertahanan (UNHAN) sebagai sekolah unggulan berbasis pertahanan. Untuk itu, semua kebutuhan kampus dan mahasiswanya harus dipenuhi oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Surattono memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke UNHAN, Sentul, Bogor, Jawa Barat, untuk melihat dari dekat operasional dan kegiatan belajar di kampus tersebut. Seluruh kebutuhan

mahasiswa UNHAN mulai dari fasilitas pendidikan hingga kebutuhan pribadi seperti sepatu, harus dibiayai negara.

"Ini menjadi bentuk nyata keseriusan negara. Semua gratis, dari sepatu sampai pendidikan. Maka wajar kita berharap UNHAN menjadi sekolah unggulan yang melahirkan SDM terbaik bangsa," ujarnya kepada

Parlementaria, se usai pertemuan, Kamis (18/7) lalu. Anton menyoroti pentingnya penguatan ikatan alumni untuk mendukung UNHAN menuju universitas unggulan.

Rektor UNHAN Letjen TNI Anton Nugroho menyampaikan, pihaknya terus berupaya memperbaiki sarana prasarana kampus serta kualitas pengajaran. Ia mengakui masih ada beberapa gedung dan fasilitas yang perlu ditingkatkan. "Kampus ini masih terus berkembang. Ada beberapa fasilitas yang kami perbaiki. Tapi, komitmen kami jelas, UNHAN harus menjadi pusat pendidikan unggulan," jelasnya.

Menurut Rektor, penguatan kualitas SDM dilakukan dengan membenahi sistem pengajaran serta memperluas jejaring kolaborasi, baik nasional maupun internasional. "Kami juga mengaktifkan peran alumni, karena mereka aset penting untuk mendongkrak reputasi UNHAN di dalam dan luar negeri," tambah Anton Nugroho.

Sinergi pemerintah, penguatan



FOTO: TARA/VEL

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Surattono saat memimpin kunjungan kerja Reses Komisi I DPR RI ke UNHAN, Sentul, Bogor.



FOTO: SAUM/VEL

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, saat memimpin Kunspek Komisi I DPR RI di Kodiklat TNI, Tangerang Selatan, Banten.

internal kampus, dan kontribusi alumni diharapkan dapat membawa UNHAN sebagai sekolah unggulan yang mampu mencetak lulusan berkelas dunia, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan nasional.

Fenomena Sosial

Sementara di Tangerang Selatan, Banten, delegasi Komisi I menyoroiti soal fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mengungkap fenomena mengejutkan dari hasil analisis transaksi keuangan nasional, yaitu lebih dari setengah juta penerima bantuan sosial (bansos) diduga menggunakan dana bantuan negara untuk berjudi secara daring.

Menurut Sukamta, fenomena ini sebagai ironi besar dan peringatan serius atas rapuhnya sistem perlindungan sosial dan ekonomi rakyat. "Pemerintah sudah berupaya keras menyalurkan bansos untuk membantu masyarakat miskin, tapi kalau dana itu justru digunakan untuk judi, ini bukan sekadar penyimpangan, tapi bisa merusak fondasi pengentasan kemiskinan,"

kata Sukamta di Kodiklat TNI, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/7) silam.

Perlu diketahui, data yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan sebanyak 571.410 penerima bansos melakukan transaksi judi *online* pada 2024. Total nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp957 miliar hingga Rp1 triliun. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring investigasi yang melibatkan bank lainnya.

"Bansos seharusnya memperkuat perputaran uang di segmen terbawah, bukan dialirkan keluar negeri lewat judi. Ini merusak ekosistem ekonomi dan membahayakan tujuan bansos itu sendiri," imbuhnya.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Pratikno telah merespons temuan ini dengan menyatakan siap memberikan sanksi tegas, mulai dari pemotongan hingga penghentian bansos

kepada penerima yang terbukti menyalahgunakannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menanggapi bansos bisa dicabut jika terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk judi *online*.

Selain aspek moralitas dan ekonomi, fenomena ini juga menyoroiti lemahnya sistem verifikasi data penerima bansos. Banyak rekening yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ternyata masih aktif secara ekonomi namun tidak diverifikasi ulang. Hal ini membuka peluang bansos diterima pihak yang tidak tepat sasaran, dan lebih rentan terhadap penyalahgunaan.

Oleh karena itu, Sukamta mendorong evaluasi sistemik terhadap tata kelola bansos dan penanganan judi *online*. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh, yang mana tidak hanya menghukum penerima bansos yang berjudi, tetapi juga membasmi ekosistem judi *online*, termasuk operator, bandar, dan platform digital yang memfasilitasi praktik ilegal ini.

tr,um/mh

Menguatkan GTRA, Menyelesaikan Konflik Agraria

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) perlu kembali dikuatkan untuk membantu menyelesaikan berbagai konflik agraria di daerah. Tak hanya itu, GTRA juga mampu mempercepat legalitas tanah adat dan menata sistem pertanahan nasional.



Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda saat menerima cenderamata dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin kunjungan delegasi Komisi II ke Ternate, Maluku Utara, mengungkapkan, banyak peraturan daerah (Perda) yang lambat mengurus tanah adat, karena ada konflik. Padahal Perda tersebut diharapkan menjadi dasar

legalitas bagi tanah-tanah adat di daerah. Apalagi Kementerian ATR/BPN juga sudah memberi pengakuan pada tanah-tanah adat tersebut.

"Kenapa konflik agraria sering muncul? Karena di mata negara, alas hak tanah adat itu belum ada secara legal formal. Itu sebabnya GTRA di daerah harus bekerja aktif, memetakan, memitigasi, dan

mengambil langkah kebijakan yang berpihak pada masyarakat," jelas Rifqi, Senin (28/7) lalu.

GTRA merupakan forum lintas sektor yang beranggotakan unsur pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, hingga OPD terkait. Ketua GTRA secara otomatis dipegang oleh kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Dengan model ini, diharapkan tata kelola pertanahan menjadi lebih terkoordinasi dan responsif terhadap dinamika lokal.

"Banyak bangunan di daerah tidak punya HGB atau masa HGB-nya habis. Kementerian ATR punya datanya, tapi tak bisa serta-merta bertindak. Harus melibatkan penegak

“

Kami sudah mengundang 39 gubernur, termasuk Ibu Sherly Laos, ke Komisi II untuk menyampaikan berbagai persoalan. Sebagian besar masalah sudah mulai kami tindaklanjuti satu per satu dengan kementerian teknis

Rifqinizamy Karsayuda
Ketua Komisi II DPR RI



FOTO: ANDRI/VEL

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, saat mengikuti kunjungan kerja di Kantor BPN Aceh.

hukum. GTRA menjembatani koordinasi ini secara persuasif," lanjut Rifqi. Ia menambahkan, apabila GTRA berjalan efektif, negara tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas aset tanah, tetapi juga meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertanahan.

Komisi II DPR RI, kata Rifqi, akan terus memantau dan mengambil inisiatif untuk mengkoordinasikan lintas kementerian dan lembaga jika diperlukan. "Kami sudah mengundang 39 gubernur, termasuk Ibu Sherly Laos, ke Komisi II untuk menyampaikan berbagai persoalan. Sebagian besar masalah sudah mulai kami tindaklanjuti satu per satu dengan kementerian teknis," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan GTRA di tingkat provinsi. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baru sekitar 30 persen lahan di Maluku Utara yang bersertifikat, sementara sisanya masih terkendala keterbatasan anggaran dan sumber

daya teknis.

"Torang punya PR besar. Baru 30 persen tanah bersertifikat. Kalau bisa ada penambahan anggaran dan bantuan teknis dari pusat, saya yakin progresnya bisa lebih cepat," ungkap Sherly.

Sementara di Aceh, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, akrab dipanggil Aher, menyoroti persoalan mendasar dalam proses sertifikasi lahan yang masih terhambat di berbagai daerah. Ia menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengingat hingga kini baru sekitar 50 persen lahan, baik milik masyarakat, negara, maupun korporasi yang berhasil disertifikatkan.

Menurut Aher, lambannya proses ini disebabkan kompleksitas tumpang tindih tata ruang, terutama antara lahan masyarakat dengan kawasan hutan negara. "Hal ini telah menimbulkan berbagai konflik, baik antara masyarakat dengan negara, masyarakat dengan korporasi, hingga antar instansi pemerintah," kata Aher dalam kunjungan kerja di Kantor BPN

Aceh, Jumat (25/7) silam.

"Banyak kawasan desa yang secara administratif telah disahkan, ternyata masuk dalam kawasan hutan berdasarkan SK yang juga diterbitkan negara. Begitu pula dengan lahan transmigrasi yang kini dinyatakan berada dalam kawasan kehutanan," ungkap politisi PKS tersebut.

Ia menambahkan bahwa lebih dari 25 ribu desa di Indonesia beririsan langsung dengan kawasan hutan, menciptakan konflik hukum dan administratif yang menghambat proses sertifikasi serta berpotensi merugikan negara, karena tertundanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sertifikasi lahan.

Untuk mengatasi persoalan ini, ia mengusulkan perluasan tugas dan keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Kehutanan, agar melibatkan berbagai elemen terkait. Ia menekankan bahwa solusi penyelesaian tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif lintas kementerian dan lembaga.

ndy,man/mh

Mengapresiasi Polda dan BNNP Sulawesi Tengah

Polda dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah mendapat apresiasi Komisi III DPR RI atas kerja kerasnya menekan angka peredaran narkoba. Ini capaian penting dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yulianti, mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) dan BNNP Sulawesi Tengah dalam menekan angka peredaran narkoba. Apresiasi tersebut disampaikan usai kunjungan kerja reses Komisi III DPR ke Mapolda Sulteng, Jumat (25/7) silam. Hadir dalam pertemuan

tersebut Kapolda Sulteng, Kepala BNNP Sulteng, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng.

"Peredaran narkoba di Sulawesi Tengah memang cukup tinggi, tetapi *alhamdulillah* berkat kerja keras berbagai pihak, akhirnya bisa menurunkan peredaran tersebut. Mereka dengan semangat yang baik untuk bangsa dan negara akhirnya berhasil juga menurunkan

peredaran yang tinggi tersebut di Sulawesi Tengah," ujarnya.

Selain masalah narkoba, Sari juga menyoroti isu penambangan ilegal yang marak di Sulteng. Menurutnya, penambangan ilegal yang dilakukan masyarakat memang menjadi sumber mata pencarian utama. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mencari solusi atas maraknya penangkapan terhadap para penambang ilegal.

"Ini butuh solusi atau kajian bersama," kata Sari. Ia mengusulkan masyarakat diberi mata pencarian alternatif atau penambangan tersebut dilegalkan melalui pembentukan koperasi. Ia mencontohkan inisiatif seperti koperasi merah putih yang pernah diresmikan oleh presiden, "Apakah itu bisa diterapkan dalam



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yulianti, saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi III DPR ke Mapolda Sulteng.

FOTO: EKI/VEL



FOTO: TASYA/VEL

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto saat mengikuti pertemuan di Polda Kalbar.

mining (tambang) tersebut atau bagaimana. Ini butuh solusi atau kajian bersama,” imbuhnya.

Komisi III DPR RI juga mengapresiasi dukungan Polda Sulteng terhadap program ketahanan pangan. Ia menyebutkan bahwa Polda Sulteng sangat suportif dalam program tanam jagung dan bahkan secara tulus membantu percontakan sawah.

“Polda dengan tulus ikhlas membantu pelaksanaan pencetakan sawah sehingga yang tadinya masih sekitar 2000-an hektar bisa ditingkatkan menjadi 7000 sekian. Ini adalah kerja-kerja dari Polda Sulawesi Tengah. Jadi kita juga harus mengapresiasi kerja-kerja aparat penegak hukum, mereka tidak hanya bekerja untuk menegakkan hukum tetapi juga bekerja untuk penegakan peradaban,” pungkaskah politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Sementara di Kalimantan Barat soal pelayanan masyarakat jadi perbincangan. Polda Kalbar diserukan meningkatkan layanannya kepada masyarakat setempat. Anggota

Komisi III DPR RI Rikwanto mendesak peningkatan kualitas pelayanan dan kepastian hukum oleh Polda Kalbar. Ia menyampaikan ini saat mengikuti pertemuan di Polda Kalbar, Jumat (25/7) silam.

“Saya minta kepada Kapolda dan jajaran agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, khususnya yang bermasalah dengan hukum. Ciptakan kepastian hukum. Kalau ada orang melapor, pertanyaannya adalah: kasusnya ditangani tidak? Kapan dipanggil? Kalau sudah penyidikan, bagaimana kelanjutannya? *Nah*, biasanya yang aktif itu si pelapor,” ungkap Rikwanto.

Ia juga menyinggung pentingnya penyidik bersikap proaktif dalam memberikan informasi kepada pelapor, terutama dalam konteks pembahasan RUU KUHAP yang tengah berlangsung di Komisi III DPR. Lebih jauh, Rikwanto juga menyoroti aspek etika dan perilaku anggota kepolisian dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa polisi adalah pelayan publik yang tugas

utamanya adalah memberikan rasa aman, bukan justru menimbulkan kecemasan.

“Masalah sikap dan perilaku anggota Polri, saya berpikir dari kenyataan yang ada, perlu diperbaiki lagi, khususnya bila bermitra ataupun berkolaborasi dengan masyarakat. Polisi harus tetap menjadi pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Jangan berhubungan dengan polisi menjadi susah atau berhubungan dengan polisi menjadi masalah. Ini harus diperbaiki lagi,” tegas mantan jenderal Polri tersebut.

Meskipun begitu, Rikwanto mengakui bahwa banyak anggota kepolisian yang telah menunjukkan kinerja baik dan profesional. Namun, ia juga menekankan bahwa kepedulian masyarakat terhadap Polri sering kali datang dalam bentuk kritik dan saran yang harus dijadikan bahan evaluasi internal. Pihaknya mendorong agar Polri, khususnya Polda Kalbar, berbenah dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berpihak pada masyarakat. — **eki,nap/mh**

Menambah Alokasi Pupuk Organik untuk Bali



FOTO: CHASBI/VEL

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Denpasar, Bali.

Permintaan penambahan alokasi pupuk organik sudah disampaikan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster. Penambahan tersebut untuk merealisasikan visi Pemerintah Provinsi Bali yang ingin menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman usai pertemuan dengan Gubernur Bali menyampaikan, penambahan pupuk organik tersebut perlu didukung sesuai visi Provinsi Bali. *'Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, yaitu menjaga kesucian dan

keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan krama Bali yang sejahtera dan bahagia.

"Secara nyata disampaikan oleh Pak Gubernur untuk penambahan permintaan alokasi pupuk organik sesuai dengan visi Bali ke depan, tentu ini akan kita tindaklanjuti," katanya saat diwawancarai Parlementaria usai memimpin

kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (4/8) silam.

Ia melanjutkan, permintaan penambahan alokasi pupuk organik itu akan segera dibahas Komisi IV DPR RI bersama dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI. "Format kunjungan kerja reses ini kami hanya

menyerap informasi dari pemerintah daerah, sehingga aspirasi-aspirasi yang menjadi perhatian Pemprov Bali tentu akan segera kami tindaklanjuti," tambah politisi fraksi PDI Perjuangan itu.

Dalam kesempatan tersebut, Pupuk Indonesia memaparkan

dalam kunjungan kerja reses Komisi IV ke Kecamatan Batujajar dan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu, (2/8) lalu.

"Kita harus membangun sistem pertanian dari hulu ke hilir, termasuk ketersediaan air, perikanan, dan peternakan," kata Dadang. Ketahanan

royong merupakan kunci utama.

Dadang juga menyoroti pentingnya legalitas kelompok tani melalui Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) guna menjamin distribusi bantuan yang tepat sasaran. "Saya mohon para penyuluh pertanian memastikan kelompok tani memiliki SIMLUHTAN. Jangan sampai yang bukan petani malah terdaftar dan mendapat bantuan," tegasnya.

Lebih jauh, ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kemandirian pangan. Ia menyayangkan fakta bahwa Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim justru masih bergantung pada impor pangan dari luar negeri.

"Jangan sampai kita negara lautan, tapi ikan dari Cina, garam dari Inggris, dan beras dari Thailand. Ini memalukan. Kita harus mandiri dalam protein hewani dan nabati," ucapnya. Politisi Partai Golkar ini juga menilai, wilayah Bandung dan Bandung Barat menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra pertanian dan agroforestri. Kawasan Nusantara 8 disebutkan ideal sebagai basis peternakan dan hutan berbasis pangan.

"Kita harus kembangkan agroforestri, hutan berbasis pangan. Kita bisa melawan ketergantungan terhadap tepung terigu," terangnya. Dadang mendorong penguatan kolaborasi pentahelix, yakni kerja sama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Pangan ini menyangkut kedaulatan. Kalau kita masih impor beras, daging, buah, dan susu, artinya kita belum merdeka. Kolaborasi pentahelix harus diwujudkan dalam semangat sabilulungan agar ekonomi nasional kuat dan siap menghadapi dinamika global," pungkasnya.

 cas,hal/mh



FOTO: IST/VEL

Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser saat kunjungan kerja reses Komisi IV ke Kecamatan Batujajar dan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat.

terkait penyaluran pupuk bersubsidi, realisasi pupuk bersubsidi di Bali sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025 baru mencapai 45 persen dari alokasi Kepmentan yaitu 30.225 ton pupuk. Alokasi tersebut menurun jika berkaca dari tahun sebelumnya, yaitu 74.531 ton pupuk.

Sistem Pertanian Terpadu

Sementara di Kabupaten Bandung Barat, Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser menekankan, urgensi membangun sistem pertanian terpadu dari hulu ke hilir, termasuk sektor perikanan dan peternakan. Hal itu ia sampaikan

pangan menjadi isu strategis yang kembali disuarakan Dadang. Ia menegaskan, pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antarlembaga dan prinsip sabilulungan atau gotong



Kita harus kembangkan agroforestri, hutan berbasis pangan

Dadang M. Naser
Anggota Komisi IV DPR RI

Meninjau Progres Infrastruktur IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus berbenah diri mempersiapkan infrastruktur. Perkembangan terakhir pembangunan ibu kota negara ini mendapat tinjauan langsung dari Komisi V DPR RI.

serah terima aset ke Otorita IKN. Namun, Otorita IKN sendiri kini menjadi mitra kerja Komisi II DPR.

Berdasarkan penjelasan dari Kemen PUPR, Kemenhub, dan Kemen PKP telah menyampaikan bahwa pekerjaan yang masih dikerjakan hanya penyelesaian pekerjaan sebelumnya dan rata-rata pekerjaan multiyears contract dari tahun sebelumnya. Kehadiran IKN ini juga tidak lepas dari peran penting pemerintah Provinsi Kaltim yang banyak melakukan dukungan terhadap pemerintah pusat, baik penyedia lahan, membangun



Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras, saat meninjau langsung perkembangan infrastruktur dan sektor transportasi di wilayah IKN, Kalimantan Timur.

Akhir Juli (28/7) lalu, delegasi Komisi V melihat dari dekat progres infrastruktur yang sudah terbangun, terutama sektor transportasi di kawasan IKN termasuk jalan tol, Bandara Internasional Nusantara, dan rumah susun untuk para ASN. Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan, ingin memastikan

pembangunan infrastruktur ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tertib administrasi.

Berdasarkan data yang ia dapatkan, beberapa fasilitas transportasi telah memasuki tahap penyelesaian pembangunan. Ia berharap, agar mitra kerja yang ditugasi membangun IKN, mempercepat penyelesaian pekerjaan dan segera melakukan

komunikasi ke masyarakat dan hal-hal lain yang dianggap strategis.

"Untuk itu, pada kesempatan ini, kami mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas dukungan signifikan dalam pembangunan IKN, baik melalui penyediaan lahan, komunikasi dengan masyarakat, maupun hal-hal strategis lainnya," ucap Andi Iwan. Selain meninjau proyek-proyek



Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti saat mengikuti kunjungan kerja ke Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur.

strategis, Komisi V juga menyerap aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kaltim terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti kontribusi besar Kaltim terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, sehingga ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi sangat krusial sebagai pendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, dan pemerataan hasil pembangunan. "Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta penunjang utama pemerataan hasil pembangunan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Ke depan, Komisi V berpesan, agar tidak hanya fokus pada pembangunan di IKN semata, namun juga memberi perhatian utama pada pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat Kaltim. "Hal ini perlu ditegaskan,

**“
Rest area akan
menjadi tempat
menarik masyarakat
untuk berkunjung ke
situ, berhenti, dan
mungkin berfoto,
karena jembatannya
cantik**

Novita Wijayanti
Anggota Komisi V DPR RI

karena kebutuhan pembangunan di Kaltim juga menyentuh sendi-sendi pembangunan infrastruktur dan transportasi, seperti masih belum memadainya akses jalan nasional dan daerah, kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, air minum, hingga pembangunan rumah dan wilayah," tuturnya.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyoroti soal Jembatan Pulau Balang di Penajam Paser Utara (PPU), yang

menjadi penghubung vital antara Kota Balikpapan dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, namun juga akan disulap menjadi *rest area* yang menawan bagi pengendara tol menuju IKN.

Novita mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan Jembatan Pulau Balang yang membentang sepanjang 804 meter dengan lebar 22,4 meter dan dilengkapi empat lajur kendaraan. Progres pembangunan telah mencapai 48,41 persen. "Menurut saya, ini cantik untuk sebuah *rest area*. Saya prediksi ini *rest area* akan menjadi tempat menarik masyarakat untuk berkunjung ke situ, berhenti, dan mungkin berfoto, karena jembatannya cantik. Ada sungai yang nyambung ke laut juga cantik," ungkap Novita usai peninjauan ke Jembatan Pulau Balang, Senin (28/7/2025) lalu.

Rest area ini, yang diperkirakan akan menjadi satu-satunya di jalan tol menuju IKN yang menawarkan pemandangan menarik dan *spot* berfoto, menuntut perhatian serius terhadap faktor keselamatan dan keamanan. Novita menekankan pentingnya pemasangan *guardrail* atau pengaman di pinggir jembatan, penempatan CCTV di beberapa titik strategis, dan pencahayaan yang memadai.

"Jangan sampai masyarakat sedang di *rest area*, istirahat, foto-foto, nanti lupa di sekelilingnya ada air, kemudian ada tembok penyangga, itu tidak diperhatikan. Maka, saya tadi mengusulkan. Jangan sampai lupa dipasang ada *guardrail* atau pengaman di pinggirannya, kemudian CCTV. CCTV-nya juga harus di beberapa titik, lampu-lampunya juga harus *men-support*, karena kita berharap tempat ini cantik tetapi nyaman dan aman untuk keselamatan," tegas legislasi Fraksi Gerindra itu. **rmm/mh**

Hilirisasi SDA dan Mengentaskan Kemiskinan

Kebijakan hilirisasi pada sumber daya alam berupa mineral akan memperkuat industri pengolahan di dalam negeri. Ada banyak nilai tambah yang didapat Indonesia dengan kebijakan ini. Di sisi lain, semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diserukan membantu pengentasan kemiskinan. Ini isu yang menjadi sorotan saat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI.



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid saat memimpin pertemuan dengan otoritas BUMN di Sorong, Papua.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan dengan otoritas BUMN di Sorong, Papua, Jumat (25/7/2025) lalu menyatakan, "Kebijakan hilirisasi mineral yang kita dorong, seperti larangan ekspor

bijih nikel, adalah langkah progresif untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan industri pengolahan di dalam negeri," ungkapnya.

Nurdin mengatakan, kawasan timur Indonesia merupakan gudang kekayaan mineral strategis dunia. Nikel, bauksit, tembaga, dan emas yang terkandung di bumi Indonesia adalah modal besar untuk kemajuan

bangsa. Nikel, misalnya, merupakan bahan baku pembuatan baterai, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kendaraan listrik. Dengan mengolah sendiri nikel di dalam negeri, tentu memberi banyak keuntungan dan manfaat besar bagi Indonesia daripada mengekspornya dalam bentuk bijih nikel atau mineral lainnya.



Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Sorong, Papua Barat Daya.

“

Kami ingin mendapatkan informasi terkait akselerasi hilirisasi produk tambang yang berkelanjutan serta memiliki tanggung jawab sosial-lingkungan

Nurdin Halid
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Pertemuan yang dihadiri oleh direksi MIND ID dan PT Antam sebagai perusahaan pelat merah yang mengolah sektor pertambangan ini, diharapkan bisa terinformasikan produksi pertambangan nasional, aksi hilirisasi, dan dampak sosial-lingkungannya bagi masyarakat. “Sedangkan dari MIND ID dan PT Antam, kami ingin mendapatkan informasi terkait akselerasi hilirisasi produk tambang yang berkelanjutan

serta memiliki tanggung jawab sosial-lingkungan,” kilah Nurdin.

Ditambahkan politisi Partai Golkar itu, di balik potensi besar sumber daya alam, bangsa ini tidak boleh abai terhadap dampak sosial dan lingkungan yang menyertainya. Isu konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, deforestasi, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan masih menjadi catatan penting.

“Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita kejar adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, tanpa meninggalkan siapa pun di belakang,” tandasnya.

Pengentasan Kemiskinan

Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah, menegaskan pentingnya peran aktif BUMN dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi VI ke provinsi yang baru dimekarkan tersebut.

“Papua Barat Daya adalah daerah yang kita semua tahu sangat kaya sumber daya alam. Harapannya,

kekayaan ini bisa berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya, menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu 16,96 persen. Ini jelas butuh intervensi dari pemerintah pusat,” ujar Ida di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (25/8/2025) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong agar masing-masing BUMN menyusun peta jalan kontribusi yang konkret dan terukur untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Papua Barat Daya. Peta jalan tersebut, menurut Ida, menjadi alat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan investasi BUMN berdampak langsung pada masyarakat, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

“Kami minta Telkom, PLN, dan BRI membuat *roadmap* kontribusi masing-masing untuk Papua Barat Daya. Ini bukan hanya soal kehadiran simbolis, tapi bagaimana mereka benar-benar hadir dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan dasar masyarakat,” tegasnya.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah akses listrik. Saat ini, tercatat masih ada 44 desa di Papua Barat Daya yang belum teraliri listrik. Kondisi geografis dan minimnya infrastruktur dasar menjadikan wilayah tersebut sebagai tantangan tersendiri dalam distribusi energi. Ida menekankan pentingnya PLN menyusun rencana yang detail dan realistis untuk menjangkau desa-desa tersebut, termasuk dengan pemanfaatan energi terbarukan.

Selain itu, masih banyak wilayah di Papua Barat Daya yang masuk kategori *blank spot* atau belum memiliki akses komunikasi. PT Telkom didorong untuk memperluas jaringan telekomunikasi, termasuk ke wilayah pedalaman, guna membuka peluang ekonomi digital dan konektivitas informasi bagi warga. **mh,ysm/mh**



Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, saat mengunjungi Industri batik di Kampung Batik Laweyan, Surakarta.

Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza yang menyoroti isu ini mengikuti kunjungan kerja reses ke Kampung Batik Laweyan, Surakarta, Sabtu, (26/7/2025) silam.

Menurut Rycko, keberhasilan industri kreatif seperti batik tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Perindustrian, guna mendorong pertumbuhan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir.

"Industri batik Solo ini tidak hanya perlu dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan agar mampu bersaing lewat kreasi warna, motif, dan tren yang modern," ujar Rycko. Ia juga menyoroti pentingnya

Membangkitkan Industri Batik Lokal

Industri batik lokal membutuhkan kerja sama terencana dan berkelanjutan, agar mampu terus berkembang dan melakukan akselerasi pasar. Sinergi pemerintah daerah, pusat, dan swasta jadi keniscayaan untuk dibangun.

kehadiran negara dalam mendukung para perajin, tidak hanya melalui program pembinaan, tetapi juga dalam penyediaan fasilitas promosi, kemudahan akses pembiayaan, dan

pelatihan berkelanjutan berbasis digital.

Rycko menilai, Kampung Batik Laweyan merupakan contoh nyata kawasan industri kreatif yang telah

berhasil menjaga kelestarian budaya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari persaingan dengan produk printing, keterbatasan akses pasar, hingga regenerasi perajin.

"Aspirasi para perajin harus benar-benar tersampaikan dan ditindaklanjuti. Dukungan konkret seperti pelatihan kreasi motif, revitalisasi peralatan produksi, dan digitalisasi pemasaran menjadi kebutuhan mendesak," tegasnya.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Surakarta yang dinilai memiliki tata kelola yang baik dalam mengembangkan sektor budaya dan ekonomi kreatif. Menurutnya, daerah dengan skala kecil namun memiliki APBD yang kuat seperti Surakarta bisa menjadi contoh pengembangan industri berbasis kearifan lokal secara nasional.

"Ini bisa jadi *role model* bagi daerah lain. Sinergi pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung UMKM dan industri kreatif harus diperkuat agar batik tidak hanya dikenal sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa," pungkas Rycko.



Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, saat mengikuti kunjungan kerja reses ke Kampung Batik Laweyan, Surakarta.

Pemanfaatan Energi Bersih

Sementara di Kabupaten Siak, Riau, Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika, mendorong pemanfaatan energi bersih berupa listrik tenaga surya untuk mendukung pelestarian kawasan *heritage* Istana Siak. Ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VII ke Kabupaten Siak, Riau, Kamis (25/7/2025) lalu.

Menurutnya, potensi alam Siak sangat besar, baik dari sektor pertanian sawit maupun migas. Namun, pengelolaan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. "Di atas ada sawit, di bawah ada minyak. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan. Kalau listriknya dari batubara, nanti ujung-ujungnya kurang bagus. Lebih baik usulkan program listrik tenaga surya," ujarnya.

Kardaya menyarankan agar program energi surya diterapkan khususnya untuk kawasan Istana Siak yang merupakan situs warisan budaya. "Karena tempatnya adalah istana *heritage*. Harus dilestarikan, dilindungi, itu kekayaan nasional," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kardaya juga menyoroti menurunnya kapasitas produksi di kilang PT BSP (Bumi Siak Pusako), dari semula 60.000 barel per hari, kini tinggal 8.000. Ia menyebut kondisi tersebut memprihatinkan dan perlu didukung pemulihan, terutama dari sisi infrastruktur perpipaan. "Kalau diangkut pakai truk, anggarannya akan membebani dan lalu lintas terganggu. Jadi, usahakan pipanya yang diprioritaskan. Itu jauh lebih aman," ujarnya. uf,hal/mh



Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika, saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VII ke Kabupaten Siak, Riau.

Mendukung Penuh Sekolah Rakyat

Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya mendukung program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Ini adalah program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung penuh.

berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan klasifikasi untuk warga miskin dan miskin ekstrem. Sistem pendidikannya pun bersifat *boarding school* atau asrama, dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh negara, termasuk makan, pakaian, dan kebutuhan belajar lainnya.

Ansory menyampaikan ini di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur, Jumat (25/7/2025) lalu. "Program Sekolah Rakyat merupakan inisiasi Presiden RI Prabowo Subianto yang selaras dengan amanat konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 34, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Karenanya, siapapun warga negara Indonesia, baik yang kaya maupun miskin, tidak boleh ada yang tidak sekolah. Semuanya harus mendapatkan hak untuk bersekolah," ujar Ansory.

Komisi VIII DPR tak lupa mengapresiasi langkah UNESA

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Ansory Siregar menyampaikan persoalan ini

saat memimpin kunjungan kerja Komisi VIII ke Surabaya, Jawa Timur. Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H Ansory Siregar saat memimpin program Sekolah Rakyat dalam kunjungan kerja Komisi VIII ke Surabaya, Jawa Timur.

FOTO: HANUM/VEL

yang menyatakan kesediaan untuk menggratiskan biaya kuliah bagi lulusan Sekolah Rakyat yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. "Ini bentuk komitmen nyata dunia pendidikan tinggi dalam mendukung cita-cita pemerataan pendidikan," ungkap Ansory.

Usai meninjau ruang kelas, asrama, dan fasilitas makan siswa/i, Ansory turut menyampaikan kesan positif terhadap antusiasme para siswa. "Alhamdulillah, setelah kami tanya satu per satu, mereka sangat senang, betah, dan penuh semangat dalam belajar. Semoga program ini menjadi pijakan kuat menuju Indonesia yang lebih adil dan berpendidikan," tutupnya.

Sekolah Rakyat di Yogyakarta

Sedangkan di Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan upaya konkret pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Hal itu disampaikan saat meninjau langsung salah satu Sekolah Rakyat di Sleman, Yogyakarta.

"Pak Presiden Prabowo melalui Sekolah Rakyat ingin memastikan bahwa kemiskinan harus diputus melalui pendidikan. Ini sangat penting agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap punya masa depan," ujar Fikri kepada Parlementaria usai meninjau dan berdialog dengan para siswa Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, di Sleman.

Dalam kunjungannya, Fikri menemui para siswa dari latar belakang keluarga prasejahtera. Beberapa di antaranya bahkan hidup tanpa kehadiran orang tua kandung dan diasuh oleh kakek-nenek.

"Ada yang bersaudara sembilan, ada yang tinggal bersama mbahnya karena orang tua sudah meninggal



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri, saat meninjau dan berdialog dengan para siswa Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, di Sleman.

“
Mereka belajar patriotisme, religiusitas, dan menghargai perbedaan. Ini bagian dari watak bangsa

Abidin Fikri
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

atau tak diketahui keberadaannya. Ini membuktikan pentingnya kehadiran negara," tambah Fikri.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan mencetak siswa cerdas, tetapi juga membentuk karakter kebangsaan. Siswa-siswa dibiasakan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari dan diajarkan nilai-nilai Pancasila secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

"Ini adalah penerjemahan nilai-nilai Pancasila dalam praktik. Mereka belajar patriotisme, religiusitas, dan menghargai perbedaan. Ini bagian dari watak bangsa," jelasnya.

Terkait fasilitas asrama, Fikri menilai kondisi fisik sudah cukup baik, terutama di sentra-sentra seperti yang ada di Yogyakarta. Ia mengapresiasi fasilitas kamar tidur yang layak dan sanitasi yang memadai. "Untuk fasilitas pokok seperti kamar tidur dan kamar mandi, saya kira sudah baik. Tinggal hal-hal kecil seperti tempat sepatu dan perlengkapan pribadi lain yang perlu sedikit perhatian," katanya.

Abidin berharap program Sekolah Rakyat dapat terus dikembangkan dan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mencetak generasi tangguh menjelang Indonesia Emas 2045. "Anak-anak inilah yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Program ini adalah investasi jangka panjang yang harus kita jaga dan kembangkan," ujarnya.

hnm, afr/mh

Meninjau Kesehatan Kerja Sektor Industri

Komisi IX DPR RI kali ini memfokuskan perhatian pada pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam kunjungan kerjanya. Ini penting, agar sektor industri yang padat karya memperhatikan isu tersebut.

aturan K3. Kepatuhan ini bukan hanya untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, tapi juga berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan," terang Putih Sari kepada **Parlementaria** di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025) lalu.



FOTO: ARIEF/VEL

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, bersama tim saat meninjau pelaksanaan K3 ke PT. Sari Warna Asli Garment di Surakarta, Jawa Tengah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengatakan, kunjungan kerja spesifik ke Kota Surakarta, Jawa Tengah, adalah meninjau

pelaksanaan K3 di sektor industri. PT. Sari Warna Asli Garment sebagai salah satu perusahaan tekstil besar di solo, mendapat kunjungan Komisi IX.

"Kami berharap seluruh perusahaan di wilayah Kota Solo dan Provinsi Jawa Tengah mematuhi

Politisi Fraksi Partai Gerindra juga menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan, pekerja, asosiasi pengusaha, pemerintah daerah, dan serikat buruh untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Diharapkan kunjungan kerja

spesifik komisi IX DPR RI menjadi sarana untuk mendengar langsung berbagai tantangan dan praktik K3 khususnya di solo.

Putih Sari menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan PT. Sari Warna Asli Garment dalam menjalankan program-program K3. Namun, ia mendorong agar K3 tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, melainkan menjadi bagian integral dari budaya perusahaan.

"Kami ingin agar praktik K3 menjadi nilai yang hidup dalam proses bisnis. Bukan hanya memenuhi standar minimum, tetapi melekat dalam setiap

menyerap aspirasi masyarakat dan mitra kerja terkait perumusan kebijakan nasional.

K3 di Yogyakarta

Sementara di Sleman, Yogyakarta, Komisi IX DPR mengunjungi PT Mitra Adi Jaya (MAJ), Kamis (17/7/2025) lalu. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat memimpin kunjungan ini, melihat dari dekat fasilitas produksi dan operasional PT MAJ untuk memastikan penerapan prosedur keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Charles menyebut pentingnya komitmen perusahaan dalam

bagaimana prosedur penanganan dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Kami mengingatkan bahwa ini tidak boleh hanya dilakukan saat ada kunjungan, tapi harus menjadi kebiasaan dan tanggung jawab berkelanjutan," ujar Charles.

Komisi IX menilai perlindungan tenaga kerja harus dimulai dari pencegahan melalui pelatihan rutin, penyediaan alat pelindung diri (APD), serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas di setiap lini produksi.

Lebih lanjut, Charles menegaskan bahwa pengawasan dan pelaksanaan K3 bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia mendorong Dinas Tenaga Kerja baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk aktif memastikan setiap perusahaan menjalankan ketentuan K3 secara menyeluruh.

"Kami berharap pemerintah daerah bisa terus memantau dan mendampingi pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan, termasuk K3, agar perlindungan terhadap pekerja tidak hanya bersifat formalitas, tapi benar-benar berdampak bagi keselamatan mereka di tempat kerja," tegasnya.

Kunjungan kerja spesifik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan di daerah, termasuk efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan regulasi turunannya.

PT MAJ sendiri merupakan perusahaan manufaktur pengolahan hasil tembakau yang menjadi salah satu penopang perekonomian lokal di Sleman. Komisi IX menganggap penting untuk memastikan bahwa industri padat karya seperti ini memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerjanya.  **afr,uf/mh**



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat mengecek penerapan prosedur keselamatan kerja di PT Mitra Adi Jaya (MAJ), Sleman, Yogyakarta.

kegiatan operasional perusahaan," terangnya. Legislator Dapil Jabar VII menambahkan, selain fokus pada K3, kunjungan ini juga bertujuan memantau pelaksanaan program kementerian/lembaga mitra kerja Komisi IX yang dibiayai APBN serta

menjaga keselamatan para pekerja, bukan sekadar demi kepatuhan administratif, tetapi sebagai budaya kerja yang melekat sehari-hari.

"Kami melihat langsung bagaimana perusahaan menerapkan standar keselamatan kerja dan

Wakil Ketua
Komisi X DPR RI
Himmatul Aliyah
saat memimpin
kunjungan ke

Semarang, Jawa Tengah, menyoroti soal ini. Katanya, perlu peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk memperkuat pendidikan kejuruan. Di Jawa Tengah sendiri, angka IPM tergolong tinggi, mencapai 73,87. Namun, capaian ini masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 75,02 dan menempatkan Jawa Tengah di urutan ke-22 dari 38 provinsi di Indonesia.

"Angka IPM ini memang cukup baik, namun perlu dicermati bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Tengah masih rendah, yaitu 8,47 tahun. Itu berarti secara umum, penduduk hanya menempuh pendidikan hingga setara kelas 2 SMP," ungkapnya di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/07/2025) lalu. Menurut Himmatul, kondisi ini menunjukkan masih ada tantangan besar dalam meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah dan atas di Jawa Tengah.

Himmatul menekankan, penting kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri untuk mendorong kemajuan pendidikan vokasi, yang dinilai strategis dalam meningkatkan daya saing sumber



FOTO: SINGIH/VEL

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah saat memimpin kunjungan ke Semarang, Jawa Tengah.

Memperkuat Pendidikan Kejuruan di Daerah

Pendidikan kejuruan mendapat perhatian Komisi X DPR RI. Sekolah ini beririsan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di setiap daerah. Semakin lama bersekolah, berarti IPM meningkat. Dan sekolah kejuruan biasanya menjadi pilihan.

daya manusia. "Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri sangat penting, tidak hanya dalam penyediaan peralatan praktik, tetapi

juga pembukaan akses magang dan kerja bagi siswa SMK," jelasnya.

Komisi X DPR RI, lanjut Himmatul, akan terus mendorong penguatan

“

Kebijakan pendidikan vokasi, termasuk dalam pembahasan anggaran

Himmatul Aliyah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI



Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayanti saat mengunjungi SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

FOTO: BIANCA/VEL

kebijakan pendidikan vokasi, termasuk dalam pembahasan anggaran dengan kementerian terkait. Himmatul berharap Jawa Tengah bisa menjadi percontohan dalam integrasi antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Sekolah Gratis

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kekhawatiran ini muncul karena bersamaan dengan rencana penurunan dana transfer daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayanti dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY, Dinas Pendidikan kabupaten/

“
Penurunan dana transfer daerah menjadi masalah serius jika putusan MK tersebut diterapkan

MY Esti Wijayanti
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

kota se-Provinsi DIY, serta organisasi profesi guru dan perwakilan kepala sekolah dan komite sekolah di Provinsi DIY, Jumat (27/7/2025) lalu di Yogyakarta.

Menurut Esti, penurunan dana transfer daerah menjadi masalah serius jika putusan MK tersebut diterapkan tanpa perhitungan matang. Selain itu, adanya batasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga

menimbulkan pertanyaan tentang definisi “sekolah gratis” yang sebenarnya.

“Ini yang memang harus kita pertegas, tidak perlu menunggu soal Undang-Undang Sisdiknas selesai, tetapi supaya tidak ada kegelisahan, saya kira kementerian perlu segera menyampaikan aturan-aturan ataupun batasan-batasan yang bisa digunakan kalau kita berkehendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi,” ungkap Esti.

Esti menjelaskan bahwa penerapan putusan MK ini tidak dapat dilakukan secara serentak. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) perlu melakukan kalkulasi mendalam menentukan sekolah mana yang benar-benar gratis, sekolah mana yang masih boleh memungut biaya, dan sekolah mana yang menolak menerima dana BOS karena tidak ingin dibatasi oleh ketentuan tersebut.

skr,bia/mh

Memberi Perhatian pada RDMP Balikpapan dan Transaksi Keuangan



Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK saat mengikuti kunjungan kerja ke Balikpapan, Kaltim, Selasa (12/8/2025).

Indonesia sedang berada di titik krusial dalam memperkuat ketahanan energi dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dua isu strategis mengemuka dalam sepekan terakhir. Kemajuan signifikan pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan polemik pemblokiran rekening masyarakat oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) jadi perhatian.

Proyek RDMP Balikpapan, yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), kini telah mencapai penyelesaian 95 persen. Proyek yang

ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) itu dipandang sebagai tonggak penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK, yang mengikuti kunjungan kerja ke Balikpapan, Kaltim, Selasa (12/8/2025) lalu, mengaku terkesan atas capaian tersebut. "Saya agak kaget ternyata realisasinya sudah 95

persen. Walaupun sempat kena faktor Covid-19, proyek tetap berjalan baik, tanpa *cost overrun*, dan sesuai target,” ungkapnya. Menurut Amin, konsumsi BBM nasional saat ini mencapai 1,5 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 580 ribu barel per hari.

Defisit pasokan itu selama ini ditutup lewat impor, yang membebani cadangan devisa. Dengan beroperasinya kilang RDMP Balikpapan pada November 2025, Indonesia diperkirakan bisa

strategis dalam menjaga kemandirian energi nasional.

Pemblokiran Rekening

Sementara itu, isu lain yang tak kalah menyita perhatian publik datang dari pemblokiran massal rekening bank oleh PPATK. Kebijakan tersebut menuai kritik lantaran disebut merugikan masyarakat dan dunia perbankan.

Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, Muhidin Mohamad Said, menyoroti langkah PPATK yang dianggap kurang selektif.

“Kalau *toh* terjadi pemblokiran, harus sangat hati-hati. Harus ada data akurat bahwa rekening itu bermasalah. Kalau tidak, jangan sampai digunakan sebagai instrumen memblokir yang merugikan masyarakat,” ujarnya di Makassar, Sulsel, Senin (11/8/2025) silam.

Menurut Muhidin, sasaran pemblokiran seharusnya ditujukan pada rekening yang jelas terlibat praktik ilegal, seperti judi *online*, pinjaman *online ilegal*, hingga perdagangan manusia. Polemik ini sempat meruncing hingga akhirnya Presiden RI, Prabowo Subianto, memanggil Kepala PPATK pada 30 Juli 2025 lalu. Tak lama setelah pertemuan itu, PPATK



Dampaknya langsung terasa pada penghematan devisa. Kita tidak lagi harus mengekspor minyak mentah untuk kemudian membeli kembali BBM dengan harga lebih tinggi

Amin AK
Anggota Komisi XI DPR RI

mengumumkan pembukaan kembali rekening-rekening *dormant* yang sempat terblokir.

Muhidin menyambut baik langkah cepat Presiden dalam meredam keresahan masyarakat. Ia pun menegaskan agar PPATK mengikuti arahan Presiden ke depan. “Pemblokiran harus sangat-sangat selektif sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tegasnya. *um,ndn/mh*



FOTO: SAJUM/VEL

memangkas impor BBM hingga 25 persen.

“Dampaknya langsung terasa pada penghematan devisa. Kita tidak lagi harus mengekspor minyak mentah untuk kemudian membeli kembali BBM dengan harga lebih tinggi,” tambah Amin.

Selisih biaya pengolahan di luar negeri, menurutnya, mencapai sekitar USD 5 per barel, yang jika dikalikan volume impor per hari menghasilkan angka devisa yang sangat besar.

Politisi Fraksi PKS itu menegaskan DPR akan terus mengawal penyelesaian proyek ini agar benar-benar menjadi instrumen



FOTO: NADHEN/VEL

Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, Muhidin Mohamad Said, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (11/08/2025).

Pemerataan Elektrifikasi Rumah Tangga

Pemerataan elektrifikasi rumah tangga jadi sorotan Komisi XII DPR RI. Ini penting agar masyarakat bisa mengakses listrik dengan baik untuk kebutuhan rumah tangga. Pembangkit listrik jadi penopang penting untuk program elektrifikasi di daerah.

menjadi perhatian utama adalah tingkat elektrifikasi berbasis satuan rumah tangga yang menggunakan listrik, bukan sekadar data administratif.

Ia menyebutkan, pendekatan lama yang menggunakan satuan desa sebagai acuan elektrifikasi

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan pentingnya pemerataan elektrifikasi berbasis rumah tangga dalam sistem kelistrikan nasional, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini disampaikan saat meninjau kondisi kelistrikan di wilayah kerja PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan DIY.

"Kelistrikan di UID Jawa Tengah dan DIY kurang lebih 7,8 gigawatt dengan cadangan hampir 40 persen dari itu," jelas Sugeng kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Yogyakarta, DIY, Sabtu (19/7/2025) lalu.

Ia menambahkan bahwa Jawa Tengah merupakan bagian dari sistem interkoneksi Jamali (Jawa-Madura-Bali), yang membuat ketersediaan energi listrik di wilayah ini cukup memadai. Menurutnya, keberadaan pembangkit listrik besar seperti di Semarang, Tambak Lorok, dan Cilacap menjadi faktor penopang utama dalam mencukupi kebutuhan energi di Jawa Tengah.

"Di Jawa Tengah banyak sekali pembangkit, baik di wilayah



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto saat meninjau kondisi kelistrikan di wilayah kerja PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan DIY di Yogyakarta.

Semarang, Tambak Lorok maupun di Cilacap, itu PLTU besar-besar. Sehingga, tingkat ketersediaan listrik di Jawa Tengah sudah memadai," lanjut politisi Fraksi Partai NasDem ini. Sugeng menggarisbawahi, yang

kerap menyesatkan, karena tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. "Hanya saja memang sebagaimana yang menjadi concern kami, tingkat elektrifikasi itu harus terus kita kejar berbasis keluarga (rumah tangga).

Jadi, setiap keluarga, hitungannya (yang sudah teraliri listrik) demikian, tidak seperti hari-hari yang kemarin, sekaligus koreksi adalah berbasis desa misalnya," katanya.

Sugeng mencontohkan kasus satu sambungan listrik yang digunakan oleh beberapa keluarga, namun tetap tercatat sebagai satu unit elektrifikasi. "Padahal, ini terdiri dari banyak keluarga, itu juga dianggap sudah teraliri. Padahal, itu hanya satu sambungan, misalnya, (tapi) untuk dipakai oleh 4-5 keluarga. Nah, sekarang diurai, direntang urai sampai sedetail itu (berbasis unit



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, saat memimpin kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, Sulawesi Selatan.

FOTO: GERALD/VEL



rumah tangga)," jelas politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia menegaskan bahwa listrik kini bukan lagi merupakan barang mewah, melainkan sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Oleh

karena itu, negara wajib hadir dalam memastikan setiap rumah tangga mendapatkan akses listrik secara merata. "Ingat listrik bukan lagi menjadi barang mewah, tapi menjadi basic need, kebutuhan pokok. Maka, kewajiban negara menghadirkan listrik sampai rumah tangga. *At all cost*, itu karena menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Sugeng.

PLTB Sidrap

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi XII membincang soal program energi baru dan energi terbarukan (EBET). Ada target bauran 25 persen pada 2030 untuk menggunakan EBET. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon, menyampaikan bahwa PLTB Sidrap telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah Sulawesi bagian selatan. Dengan kapasitas produksi sebesar 202,9 megawatt, PLTB ini mampu menerangi kurang lebih 42.000 rumah tangga.

"Kita punya target bauran energi bersih sebesar 25 persen dalam sistem grid nasional pada tahun 2030. Saat ini secara nasional baru tercapai

sekitar 13 persen, namun capaian di Sulawesi sudah mencapai 34 persen. Ini tentu menjadi contoh dan capaian yang membanggakan," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Kamis (18/7/2025), dalam kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, Sulsel.

Kunjungan ini bertujuan melakukan pengawasan terhadap efektivitas dan keberlanjutan proyek-proyek energi baru terbarukan, sekaligus mendorong komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperluas pemanfaatan energi bersih di Tanah Air. Menurutnya, tingginya capaian bauran energi di Sulsel menjadikan provinsi tersebut sebagai wilayah dengan kontribusi energi bersih tertinggi secara nasional.

PLTB Sidrap sendiri menyumbang hampir 8 persen dari total bauran EBET di wilayah Sulawesi bagian selatan. Komisi XII DPR RI mengapresiasi kerja sama antara PLN dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan energi terbarukan. Dony juga menekankan pentingnya eksplorasi lanjutan terhadap wilayah-wilayah potensial yang memiliki kecepatan angin tinggi.

[ysm.go/id](https://www.ysm.go.id)

Meningkatkan Layanan Keimigrasian

Saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Komisi XIII DPR RI menyorot tingginya permintaan pembuatan paspor, terutama di kawasan wisata Labuan Bajo. Akses layanan keimigrasian harus dioptimalkan, agar masyarakat menikmati kemudahan yang terbangun.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyampaikan hal ini saat memimpin kunjungan ke destinasi wisata Labuan Bajo,

Manggarai Barat, NTT, Jumat (25/7/2025) lalu.

Dewi menekankan pentingnya sinergi semua lembaga yang berorientasi pelayanan publik, agar pelayanan kepada masyarakat bisa terpadu dan terkoodinasi.

“

Kami mengingatkan agar koordinasi antara instansi imigrasi dan dinas tenaga kerja, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Dewi Asmara
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI



FOTO: ICHA/VEL

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara saat memimpin kunjungan ke destinasi wisata Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

"Yang kami dorong adalah agar pengukuran pelayanan masyarakat, baik itu dalam urusan hukum, imigrasi, pemasyarakatan, maupun lembaga lain seperti LPSK, benar-benar dilakukan secara terpadu dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat," ungkap legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diperoleh Komisi XIII DPR, Labuan Bajo tercatat sebagai salah satu daerah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi di sektor imigrasi. Namun, permintaan paspor justru tercatat paling tinggi berasal dari Kupang dan Atambua.

"Banyaknya permintaan paspor di daerah wisata harus kita sikapi hati-hati. Kami mengingatkan agar koordinasi antara instansi imigrasi dan dinas tenaga kerja, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dapat dilakukan lebih optimal," ujarnya.

Dewi mengingatkan, besarnya permintaan paspor untuk keperluan wisata bisa saja menjadi celah untuk praktik perdagangan orang. "Jangan sampai paspor yang dibuat untuk tujuan wisata justru disalahgunakan, terutama untuk kegiatan yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Banyak kasus baru terungkap setelah para korban menderita di luar negeri," tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar pengawasan terhadap proses penerbitan paspor ditingkatkan, khususnya di daerah dengan tingkat migrasi tinggi. "Kami tentu mendukung pelayanan yang semakin cepat dan maksimal, tapi tetap harus dibarengi dengan kewaspadaan. Penting agar pengeluaran dokumen perjalanan dilakukan dengan selektif, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab," pungkas Dewi.

Sementara di Sulawesi Tenggara, Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus menegaskan, Kementerian



Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XIII di Kendari, Sulteng.

FOTO: ANJU/VEL

Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM harus lebih selektif memberikan izin masuk dan bekerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya di wilayah-wilayah industri dan pertambangan seperti Sulawesi Tenggara.

Pernyataan itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi XIII ke Provinsi Sulawesi Tenggara. "Saya minta agar imigrasi tidak sekadar formalitas dalam memberikan izin kepada TKA. Harus jelas keahliannya, dan tidak boleh menggeser kesempatan kerja masyarakat lokal. Kita tidak ingin masyarakat kita jadi penonton di tanah sendiri," tegas Edison di hadapan Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara di Kendari, Jumat (25/7/2025) lalu.

Ia menyatakan keprihatinannya terhadap banyaknya TKA, khususnya yang berasal dari Tiongkok, bekerja di sektor pertambangan nikel dan smelter di wilayah Konawe dan Morowali. Berdasarkan data dari

Kementerian Ketenagakerjaan RI, per Juni 2025, tercatat lebih dari 34.000 TKA bekerja di Indonesia, dengan Sulawesi Tenggara menjadi salah satu provinsi dengan jumlah TKA terbanyak di sektor industri berat.

Menurut Edison, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para pencari kerja lokal. "Kalau masyarakat lokal hanya diberi pekerjaan sebagai tenaga kasar, sementara TKA duduk di posisi teknis atau manajerial, ini tidak adil. Kita perlu keberpihakan kepada rakyat," tambah politisi Fraksi PAN ini.

Lebih lanjut, Edison juga mendorong adanya sinergi antara imigrasi dan kantor ketenagakerjaan dalam melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap setiap permohonan izin tinggal terbatas bagi TKA. "Kita tidak anti terhadap TKA, tapi regulasi harus ditegakkan. TKA yang diizinkan masuk harus membawa transfer pengetahuan dan keahlian yang benar-benar dibutuhkan," ujarnya.  ica,aas/mh

Polemik Pemblokiran Rekening

Perlindungan atau Pelanggaran Hak

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memicu perdebatan publik setelah mengumumkan kebijakan pemblokiran sementara rekening *dormant* atau rekening yang tidak aktif selama tiga hingga dua belas bulan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi @ppatk_indonesia pada Senin (28/7/2025) lalu.

Dalam penjelasannya, PPATK menyebut langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening pasif oleh jaringan kejahatan, seperti jual beli rekening, judi *online*, dan tindak pidana pencucian uang. Meski dana nasabah dinyatakan aman dan dapat diaktifkan kembali melalui prosedur verifikasi, kebijakan ini segera memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk anggota legislatif.

Sejumlah anggota DPR RI ramai-ramai menilai kebijakan tersebut tergesa-gesa, minim sosialisasi, dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai, rencana PPATK memblokir rekening pribadi yang tidak aktif selama tiga bulan atau lebih sebagai langkah berlebihan dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Ia menegaskan bahwa PPATK seharusnya fokus mengawasi transaksi keuangan mencurigakan, bukan menyentuh ranah privat warga atau mengelola kebijakan teknis perbankan seperti pemblokiran rekening pasif.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro.

"Rekening tidak aktif bukan berarti mencurigakan. Banyak orang menyimpan uang untuk tabungan umrah, dana pendidikan, pensiun, atau investasi jangka panjang. Negara tidak boleh seenaknya membatasi akses warga terhadap uangnya sendiri," ujarnya pada Jumat (1/8) lalu.

Menurut Fauzi, PPATK seharusnya fokus mengawasi transaksi mencurigakan, bukan mengelola kebijakan teknis perbankan yang menyentuh ranah privat masyarakat.

Senada, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP berpendapat, apa yang disampaikan PPATK mungkin maksudnya baik, tapi sayangnya banyak masyarakat belum mendapatkan informasi yang utuh. Ini isu yang sangat sensitif dan menarik perhatian publik, pasti akan bereaksi. PPATK harus menjelaskan dasar, latar

belakang, hingga tujuan pembekuan rekening itu secara rinci.

"OJK dan PPATK harus segera menjelaskan hal tersebut agar bank dan nasabah tetap dalam situasi yang kondusif. Jangan sampai kewenangan PPATK untuk memblokir rekening dilakukan tanpa kejelasan syarat dan kriteria yang jelas," katanya akhir Juli lalu.

Namun, di sisi lain sebagian legislator menilai kebijakan pemblokiran rekening *dormant* yang diambil PPATK merupakan langkah tepat untuk melindungi dana nasabah sekaligus menutup celah kejahatan keuangan. Demikian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pandangannya, awal Agustus silam.

"PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP.



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.



Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

diduga *dormant*. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan uang nasabah, bukan untuk merugikan mereka," ucap Dasco.

Begitu juga yang disampaikan. Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Ia melihat, kebijakan pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK adalah langkah strategis untuk mencegah rekening pasif jatuh ke tangan pelaku kejahatan. Ia menegaskan, kebijakan ini bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan hasil verifikasi bersama pihak bank terhadap rekening yang dinilai berpotensi disalahgunakan.

"Rekening-rekening yang diblokir adalah yang statusnya *dormant* dan punya potensi dimanfaatkan untuk kejahatan. Kalau bersih, ya dikembalikan ke pemiliknya," ujarnya, awal Agustus lalu.

Ia juga mengungkapkan keberhasilan konkret kebijakan ini dalam memberantas praktik ilegal. Setelah pembekuan dilakukan, transaksi judi *online* menurun drastis hingga 70 persen. Angka ini menunjukkan bahwa banyak jaringan kejahatan finansial selama ini bergantung pada rekening pasif untuk menyamarkan aliran dana. Baginya, hasil ini membuktikan efektivitas PPATK dalam memutus mata rantai kejahatan, sekaligus menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Namun pada akhirnya PPATK menghapus kebijakan pemblokiran rekening *dormant* setelah menuai kritik luas. PPATK membuka kembali 122 juta rekening yang sempat diblokir, sambil menegaskan bahwa dana

nasabah tetap aman dan dapat diakses kembali setelah proses verifikasi. Langkah ini disambut positif oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menilai keputusan tersebut menunjukkan respons cepat terhadap keresahan publik.

Ia mengingatkan bahwa penyusunan kebijakan di sektor keuangan memerlukan kehati-hatian ekstra karena menyangkut hal yang sangat sensitif bagi masyarakat. "Saya mengapresiasi PPATK yang cepat merevisi kebijakannya, sadar bahwa ada kekeliruan. Dan memang harus seperti ini. Apalagi menyangkut aliran keuangan yang sifatnya sensitif bagi setiap orang. Janganlah kita menyusahkan rakyat," ujarnya.

gal/mh

Demokrasi Lingkungan, Melawan Krisis Iklim

Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu masa depan. Banjir, gelombang panas, dan bencana ekologis kini hadir di depan mata, memberi tanda bahwa bumi sedang menghadapi krisis yang nyata. Namun, solusi iklim tak cukup disandarkan pada teknologi atau kebijakan teknis semata. Diperlukan tata kelola yang terbuka, adil, dan partisipatif.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Hartato saat mengikuti pertemuan SEAPAC di Bulaksumur, Yogyakarta, 21 Agustus 2025.

Sebuah gagasan demokrasi lingkungan yang disusun oleh SEAPAC (Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption) yang di dalamnya termasuk BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) DPR RI. Gagasan dengan sebuah pendekatan yang menekankan keterbukaan informasi, partisipasi

publik, serta akses keadilan bagi masyarakat dalam setiap kebijakan lingkungan.

Dengan prinsip tersebut, aksi iklim tak hanya berhenti pada target penurunan emisi, melainkan juga memastikan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi lingkungan mengubah ikhtiar mengatasi perubahan iklim dari sekadar mandat birokrasi menjadi

gerakan bersama yang kolaboratif dan akuntabel.

Keterlibatan Indonesia dalam SEAPAC sangat penting, tidak hanya karena BKSAP DPR RI menjadi bagian dari organisasi tersebut. Lebih jauh, kehadiran BKSAP menunjukkan komitmen parlemen Indonesia untuk terlibat dalam diplomasi regional, memperjuangkan tata kelola lingkungan yang transparan,

sekali­gus mem­per­kuat po­si­si In­do­ne­sia da­lam fo­rum in­ter­na­si­o­nal.

Semangat itulah yang mewarnai Forum Meja Bundar Bulaksumur 2025 di Universitas Gadjah Mada. Forum yang diselenggarakan bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) dan jaringan parlemen Asia Tenggara SEAPAC dengan tema “Mengatasi Perubahan Iklim dengan Demokrasi Lingkungan” menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP30. Salah satu agenda utama dalam acara tersebut adalah peluncuran Observatorium

Singapura, Brunei Darussalam, hingga Timor-Leste—dengan dukungan riset dari UGM.

Kehadiran observatorium ini diharapkan menjadi panduan bersama dalam membangun tata kelola lingkungan yang lebih adil dan akuntabel. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Hartato menjelaskan bahwa penting peran parlemen dalam mengawasi jalannya komitmen iklim nasional, khususnya menjelang penyusunan dokumen NDC 3.0 yang wajib diserahkan tahun ini.

dalam pertemuan di Bulaksumur, Yogyakarta, 21 Agustus silam.

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa perjuangan melawan krisis iklim bukan hanya tentang menyelamatkan bumi, melainkan juga menjaga martabat manusia dan menjamin keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Sehingga, perlu sebuah kolaborasi lintas negara berbasis demokrasi lingkungan.

Dengan transparansi, partisipasi, dan keadilan sebagai fondasi, aksi iklim tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih berkelanjutan. Pesan inilah yang kemudian akan dibawa dalam COP30, sebuah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Brazil pada November 2025 mendatang.

Pertemuan SEAPAC di Bulaksumur, Yogyakarta tahun ini menjadi ajang penting bagi organisasi itu sendiri. Dalam Rapat Umum Tahunan, Lee Chaen Chung dari Malaysia terpilih sebagai Presiden SEAPAC periode 2025–2027, menggantikan Fadli Zon dari Indonesia yang notabene merupakan Ketua BKSAP DPR RI sebelumnya, namun kini dipercaya menjadi Menteri Kebudayaan Indonesia.

Ditambahkan politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, pergantian kepemimpinan ini menandai babak baru perjalanan SEAPAC. Sekali­gus mem­per­tegas peran or­ga­ni­sa­si ini da­lam mem­per­juangkan ta­ta ke­lo­la yang de­mo­kra­ti­sis di Asia Ten­ga­ra, ter­ma­asuk da­lam men­gha­dapi tan­ta­ngan pe­ru­ba­han iklim.

Dalam kesempatan itu, selain Ravindra hadir juga beberapa anggota BKSAP DPR RI lainnya seperti Hikmatul Aliyah, Amelia Anggraini, Surya Utama, dan Syahrul Aidi Maazat, serta beberapa delegasi dari negara tetangga seperti dari Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Filipina, Timor Leste dan Singapura.

ayu/mh



FOTO: AYU/VEL

Demokrasi Lingkungan Asia Tenggara (SEA EDO).

Inisiatif ini dirancang untuk mengukur sekaligus memperkuat demokrasi lingkungan di kawasan, dengan fokus pada tiga pilar utama: akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan. Program ini melibatkan kolaborasi lintas negara—mulai dari Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja,

“Parlemen tidak sekadar membuat regulasi, tetapi juga mengawasi implementasinya serta memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian dari proses. Dalam konteks ini, demokrasi lingkungan juga dipandang sebagai cara untuk mencegah praktik korupsi hijau, yang sering kali menjadi penghambat pembangunan berkelanjutan,” ungkap Ravindra

Rio Dondokambey

Dukungan Sertifikasi dan KUR UMKM

Suasana nongkrong di kawasan Megamas Manado, Rabu (14/8) silam, menjadi ajang dialog antara anggota DPR RI Rio Dondokambey dengan komunitas anak muda serta pelaku UMKM.

Pertemuan yang digelar di Sunbae Kawasan Megamas, pelataran Dinas Pariwisata Manado, turut dihadiri Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang.

Dalam kesempatan itu, Rio menyampaikan lahirnya *Pemuda Project*, wadah inkubasi untuk UMKM dan usaha baru di Kota Manado.

"*Pemuda Project* adalah hasil dari diskusi kami bersama-sama ekonomi kreatif Kota Manado. *Pemuda Project*

“
Sertifikasi halal untuk kuliner, NIB akan kami bantu, serta bantuan pengurusan pencairan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR)

akan kami gunakan sebagai satu wadah inkubasi UMKM dan usaha baru,” jelasnya.

Ia menegaskan komitmen untuk mendampingi para pelaku usaha. Sesuai data LP3H Sulawesi Utara, Rio telah memfasilitasi sekitar 1.000 sertifikat halal di Kota Manado. “Sertifikasi halal untuk kuliner, NIB akan kami bantu, serta bantuan pengurusan pencairan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ungkapnya.

uc/mh



Foto: Ist/vei

Anggota DPR RI Rio Dondokambey melakukan kegiatan dialog dengan komunitas anak muda serta pelaku UMKM di kawasan Megamas Manado.

Ranny Fahd Arafiq

Layanan Kesehatan Inklusif untuk Kelompok Rentan



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, saat memberikan Sosialisasi GERMAS di Kota Bekasi Timur.

Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VI, Ranny Fahd Arafiq, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

Kali ini, ia hadir dalam kegiatan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Bekasi Timur, bekerja sama dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok

Rentan Kementerian Kesehatan RI.

Dalam sambutannya, Ranny menegaskan bahwa membangun bangsa yang sehat tidak hanya berarti meningkatkan fasilitas dan pelayanan, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang paling rentan

tidak tertinggal. "Kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan lainnya berhak mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Bukan sekadar layanan, tapi juga kepastian bahwa mereka didengar, dipahami, dan dilayani dengan empati," ujar Ranny.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, sekaligus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapat perhatian dan perlindungan yang setara dalam sistem kesehatan nasional.  aha/mh

H.M. Husni

Sosialisasikan Program Sekolah Rakyat

Anggota Komisi VIII DPR RI, H.M. Husni gencar melakukan sosialisasi program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ini program populis yang sangat mementingkan rakyat kecil dengan kemiskinan ekstrem.

Husni memperkenalkan program prioritas pemerintahan baru ini kepada masyarakat Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara pada akhir Juli lalu. Program ini memang butuh sosialisasi masif dan luas, agar masyarakat bisa mengakses pendidikan gratis dan bermutu, terutama bagi kalangan miskin.

"Sekolah Rakyat akan menjadi tumpuan baru bagi upaya pemerataan akses pendidikan

berkualitas. Presiden Prabowo berkomitmen untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah Rakyat adalah jawaban terhadap tantangan pendidikan saat ini," tegas Husni.

Program Sekolah Rakyat diyakini menjadi solusi pendidikan inklusif, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Politisi Partai Gerindra itu

menyampaikan sosialisasi Sekolah Rakyat dalam rangkaian acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang menjadi program rutin setiap anggota MPR RI.

Dalam kesempatan itu, Husni menegaskan pentingnya pemahaman dan pengamalan terhadap Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ia juga mengajak para tokoh masyarakat dan seluruh elemen warga untuk bersama-sama menjaga keutuhan Empat Pilar Kebangsaan sebagai fondasi berdirinya NKRI. "Sebagai warga Indonesia yang baik, Empat Pilar Kebangsaan ini harus dijaga, karena merupakan landasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," legislator dapil Sumatera Utara I ini.  [we/mh](#)



Anggota Komisi VIII DPR RI, H.M. Husni saat melakukan sosialisasi program Sekolah Rakyat di Medan.

Shadiq Pasadigoe Membumikan Nilai- Nilai Pancasila

Anggota Komisi XIII DPR RI Shadiq Pasadigoe, meminta pemerintah tidak boleh main-main dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan seluruh instrumen negara harus benar-benar turun ke masyarakat, bukan sekadar menggelar acara seremonial.



FOTO: IST/VEL

Anggota Komisi DPR RI Shadiq Pasadigoe, saat kegiatan Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila, di Gedung Nasional Tanah Datar, Sumatera Barat.

“Sudah cukup Pancasila hanya dijadikan jargon. Pemerintah, melalui BPIP, harus sungguh-sungguh membumikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata rakyat. Ini soal masa depan bangsa,” tegas Shadiq dalam kegiatan Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila, di Gedung Nasional Tanah Datar, Sumatera Barat, akhir Juli silam.

Shadiq menyinggung kondisi sosial dengan maraknya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba,

meningkatnya perceraian, hingga menurunnya kesadaran kolektif terhadap nilai kebangsaan. “Semua ini terjadi karena negara lemah dalam menanamkan fondasi ideologi. Pendidikan Pancasila tidak boleh berhenti di sekolah. Harus masuk ke rumah, ke pasar, ke kantor, ke sawah, ke seluruh sendi kehidupan,” kata Shadiq.

Ia mendesak pemerintah dan BPIP untuk memperkuat program

aksi lapangan yang langsung menasar masyarakat akar rumput. Pemerintah pusat dan daerah harus mengintegrasikan Pancasila dalam seluruh kebijakan publik, termasuk pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.

“Memastikan pengawasan dan evaluasi nyata, bukan hanya laporan-laporan administratif,” tandas legislator NasDem dari Dapil Sumatera Barat I (Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Kota Solok) itu.

Shadiq menyebut beberapa dasar hukum yang mengikat pemerintah untuk melaksanakan pembinaan Pancasila, seperti UUD 1945, Peraturan Presiden No.7/2018 tentang BPIP, Instruksi Presiden No.12/2023 tentang Penguatan Pendidikan Pancasila, serta Permendikbud Ristek No.7/2021 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pancasila.

“Kalau negara tidak serius, maka kita akan kehilangan arah. Pancasila bukan hiasan, ini ideologi hidup yang harus diinternalisasi. Jangan menunggu Indonesia krisis identitas baru kita bergerak!” ucapnya.

 we/mh





FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI Iyeth Bustami melakukan penanaman mangrove di kawasan Konservasi Paghet Sengagah.

Iyeth Bustami Ajak Masyarakat Hijaukan Bengkalis Untuk Cegah Abrasi

Anggota DPR RI Iyeth Bustami menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pusat Pengembangan Lingkungan Hidup di kawasan Konservasi Paghet Sengagah, Desa Kelapapati, Bengkalis, pertengahan Agustus lalu.

Dalam kegiatan yang dibuka Asisten Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ed Effendi, Iyeth menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab Bengkalis.

"Kegiatan ini adalah komitmen kami dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan ruang terbuka hijau di Bengkalis. Ini juga bagian dari

“
Kegiatan ini adalah komitmen kami dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan ruang terbuka hijau di Bengkalis.

agenda penghijauan sekaligus upaya menanggulangi abrasi yang terus mengancam,” ujarnya.

Acara ini mengusung tema Percepatan Kegiatan Berbasis Masyarakat Melalui Komunitas yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan. Usai pembukaan, Iyeth bersama Ed Effendi dan anggota DPRD Bengkalis melakukan penanaman mangrove secara simbolis sebagai bentuk nyata gerakan mencintai lingkungan.

uc/mh

Achmad Dorong Peningkatan Sarpras Pendidikan

Politisi Fraksi Partai Demokrat, Achmad melakukan kunjungan kerja ke Desa Muara Jaya dan Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di daerah tersebut.

Dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat, perangkat desa, guru, serta pemuda, sejumlah isu prioritas disampaikan. Di antaranya terkait minimnya sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan,

keterbatasan wadah pembinaan generasi muda, dan harapan agar sektor pertanian dan kesenian lokal mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Warga mengeluhkan kondisi pendidikan yang masih belum memadai, baik dari sisi infrastruktur

seperti ruang belajar yang rusak, maupun kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas pendukung lainnya. Pendidikan karakter dan keagamaan juga dinilai masih belum optimal. Hal ini dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang berakhlak dan mandiri.

Menanggapi hal itu, Achmad menegaskan, pendidikan merupakan fokus utama pembangunan sumber daya manusia, dan akan menjadi bagian penting dari perjuangannya melalui Komisi VIII DPR RI. Selain pendidikan, warga juga berharap dukungan nyata untuk kegiatan pemuda di bidang kesenian dan pelestarian budaya lokal. Kesenian dinilai mampu menjadi sarana pembinaan karakter, mencegah pergaulan bebas, dan menjauhkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.

Di bidang ekonomi, masyarakat kedua desa menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan modernisasi pertanian. Mereka berharap pemerintah dapat membantu melalui pelatihan pertanian berbasis teknologi, penyediaan alat pertanian modern, serta pendampingan usaha tani agar hasil produksi meningkat dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak.

Achmad menyambut baik aspirasi ini dan modernisasi pertanian merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan transformasi sektor pertanian nasional menjadi lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. **bia/mh**



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI, Achmad saat serap aspirasi dari warga dalam kunjungan kerja ke Riau.

Rizal Bawazier Memakmurkan Masjid

Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menyambangi Masjid Al Amin di Komplek Bina Griya Indah, Tegalrejo, Pekalongan Barat, Agustus silam. Kunjungan anggota Fraksi PKS itu disambut hangat para takmir masjid.

Selain untuk silaturahmi, kunjungan Rizal itu untuk melihat langsung hasil renovasi yang ia donaturi. Di dalam masjidnya kini terasa lebih sejuk, karena ada pendingin udara. Rizal mengungkapkan perasaan bahagiannya melihat masjid yang terasa semakin nyaman. Peralnya, kenyamanan saat beribadah merupakan kunci utama.

Ketika jemaah merasa nyaman, maka akan merasa betah untuk terus mengunjungi masjid, dan kegiatan keagamaan pun akan lebih hidup. Bahkan, di masjid tersebut telah berlangsung pengajian rutin dan ada Taman Pendidikan Al Qur'an. Ia

berharapan, jumlah jemaah semakin meningkat seiring perbaikan masjid.

Dalam kesempatan itu Rizal menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar rumah ibadah bisa terus hidup dan menjadi pusat peradaban yang makmur. Alhamdulillah kita mengunjungi salah satu aspirasi yang kita terima untuk renovasi Masjid Al Amin. Walaupun belum 100 persen, tapi insyaallah dalam satu minggu ke depan sudah selesai," ungkapnya.

 **bia/mh**



FOTO: IST/VEL

Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier melihat langsung hasil renovasi Masjid Al Amin di Pekalongan Barat.

Eddy Soeparno Memperbaiki Kualitas MBG di Bogor

Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III, Eddy Soeparno, merespons kasus keracunan siswa di Kota Bogor yang diduga akibat makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya diberitakan, sebanyak 36 siswa SD dan SMP di Tanah Sareal, Kota Bogor mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani Tanah Sareal.

Bagi Eddy, peristiwa di Bogor dan juga sebelumnya di Cianjur menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat dan meningkatkan perbaikan program MBG ke depan. "Program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda kita. Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," kata legislator Fraksi PAN DPR ini.

Ia mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus ini dan yakin proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan. Secara khusus, Eddy memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini, karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil)-nya.

"Saya memberikan perhatian penuh pada kasus ini karena terjadi di Dapil saya Kota Bogor dan Cianjur. Insyaallah saya siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan



Anggota DPR RI, Eddy Soeparno saat meninjau dan melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bogor.

agar ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN)," ungkapnya.

Ia juga mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim yang melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah

sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik, dengan standar kesehatan, keamanan dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizinya juga meningkat," jelasnya.

aha/mh

Memperingati 60 Tahun CONEFO

Saksi Bisu Mimpi Besar Bangsa

Gedung Nusantara DPR RI ialah bangunan yang lahir dari mimpi besar untuk menghadirkan tatanan dunia yang berkeadilan. Di balik atap ikoniknya yang menyerupai helaian sayap, tersimpan cerita tentang diplomasi, solidaritas global, dan perjuangan melawan ketidakadilan.

Latar belakang lahirnya Gedung Nusantara tidak bisa dilepaskan dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.

Kala itu, Indonesia bersama negara-negara lain seperti India dan Sri Lanka berinisiatif menyatukan suara bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang sedang berusaha merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonialisme Barat lewat pergeleran Proyek CONEFO (Conference of the New Emerging Forces).

Konferensi ini dirancang bukan menjadi sekadar forum, melainkan manifestasi dari cita-cita untuk menciptakan dunia ketiga yang mandiri, seimbang, dan tidak tunduk pada dominasi dua blok besar, Blok Barat dan Blok Timur, yang kala itu membelah dunia. Namun, peristiwa politik pada tahun 1965 mengubur impian itu sebelum sempat diwujudkan.

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana, mengungkapkan bahwa Gedung Nusantara DPR RI bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan simbol dari cita-cita global yang digagas oleh Presiden Soekarno pada masa-masa krusial pascakemerdekaan. "Saya ingin tekankan, kita memahami gedung ini bukan sekadar bangunan mati, tapi ada mimpi besar di baliknya. Mimpi tentang tatanan dunia yang lebih berkeadilan dan setara," terangnya.

Anggota Komisi X DPR RI
Bonnie Triyana.



FOTO: TARI/VEL

Sebagai sejarawan, menurutnya, meski fungsi telah berubah, semangat di balik pembangunan gedung ini seharusnya tetap menyala. Jika dahulu Bung Karno memimpikan dunia tanpa penindasan, maka kini, seharusnya bisa menjadi rumah rakyat, yang mana para wakil rakyat menyuarakan kepentingan rakyat yang terpinggirkan.

Ia pun menyadari tantangan yang dihadapi bukan hanya menjaga nilai sejarah, namun juga bagaimana ide besar itu terus menjadi sumber inspirasi. Apalagi, desain bangunan yang telah berusia lebih dari 50 tahun ini masih diakui keunggulannya oleh para arsitek. "Desainnya sangat futuristik. Dibangun tahun 60-an, tapi sampai sekarang masih menjadi perbincangan arsitektur. Ini bukti bahwa arsitekturnya membaca masa depan," ungkapnya.

Soal bentuk arsitekturnya kepankan sayap, Bonnie menyikapinya dengan terbuka. Ia menjelaskan bahwa penafsiran tersebut tidak pernah muncul dalam desain awal, namun lahir dari diskusi publik sebagai interpretasi kreatif. Dengan demikian, gedung ini tidak hanya berdiri sebagai penanda fisik, tetapi juga menjadi ruang yang hidup, yang membuka ruang narasi, tafsir, dan ide-ide bertumbuh dan berkembang.

Oleh sebab itu, Bonnie menilai penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melihat gedung DPR bukan sekadar tempat kerja para legislator, akan tetapi sebagai monumen peradaban dan simbol perjuangan bangsa. Ia pun menyerukan pentingnya edukasi parlemen kepada publik, terutama generasi muda, agar memahami bahwa Gedung Nusantara DPR bukan sekadar simbol kekuasaan, tapi juga manifestasi dari idealisme kebangsaan.

"Idealnya, gedung ini bukan hanya diisi oleh rutinitas politik dan legislasi. Tapi juga menjadi sumber semangat untuk menciptakan sistem politik



yang membebaskan, yang adil, dan berpihak pada rakyat," tandas Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Bonnie mengungkapkan sejarah berdirinya CONEFO tersebut pada Seminar Nasional bertajuk "Dari CONEFO menjadi Rumah Rakyat: Gedung DPR RI sebagai Cagar Budaya Nasional" di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, akhir Juli lalu. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar juga menyampaikan sambutannya. 60 tahun, katanya, bukan hanya angka. Dalam banyak budaya, ini adalah simbol kelahiran kembali, pembaruan energi, dan berkah.

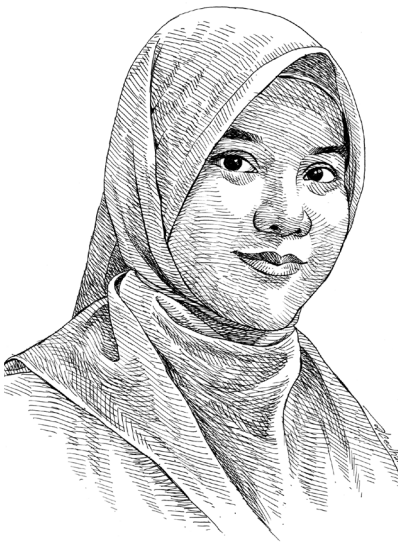
Kompleks parlemen kita bukan sekadar bangunan, tetapi rumah aspirasi rakyat Indonesia. Tempat ini adalah simbol pengharapan terhadap kemakmuran dan kebesaran bangsa. Gedung Nusantara yang dulu dikenal sebagai bagian dari Proyek CONEFO merupakan gagasan besar Presiden Sukarno pasca-Perang Dunia II. Kompleks ini dirancang sebagai simbol kekuatan dan kemandirian negara-negara berkembang yang ingin melepaskan diri dari dominasi Blok Barat dan Timur.

Menurutnya, Gedung Nusantara tetap menjadi salah satu karya

arsitektur paling unik di Indonesia. Banyak arsitek mengakui bahwa teknik konstruksi gedung ini rumit dan tidak tertandingi. Keunikan kubah hijau serta gaya modern tropis yang diadopsi menunjukkan kemajuan pemikiran perancangannya pada masa itu.

"Gaya arsitekturnya luar biasa. Banyak yang mengatakan, Gedung Nusantara adalah salah satu bangunan yang tidak akan pernah kehilangan relevansi visual dan simboliknya, bahkan lintas generasi," katanya. Setelah melalui proses panjang, paparnya, Gedung Nusantara telah direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional oleh Tim Ahli Cagar Budaya dalam sidang yang digelar pada 13 Juni 2025. Penilaian dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

"Gedung Nusantara ini sangat istimewa. Ia memenuhi seluruh kriteria penetapan Cagar Budaya Nasional, mulai dari simbol persatuan bangsa, nilai budaya yang luhur, sampai arsitekturnya yang langka dan khas. Sangat jarang ada bangunan yang bisa memenuhi ketiga syarat ini sekaligus," jelas Indra.  **bia/mh**



Oleh:
Lara Maisha
Dokter Konselor Laktasi,
Klinik Utama BumilQ
Kabupaten Tangerang

Menciptakan Lingkungan yang Nyaman Bagi Ibu Menyusui

Menyusui merupakan salah satu langkah awal yang penting untuk membangun generasi emas Indonesia, generasi yang sehat, kuat, serta cerdas. Air Susu Ibu (ASI) tidak hanya mengandung nutrisi yang sempurna untuk bayi, tetapi juga dapat mempererat ikatan batin antara ibu dan anak.

Menyusui bukan hanya proses biologis, tetapi juga tindakan emosional, fisik, dan sosial yang memerlukan lingkungan yang mendukung. Ibu yang mendapat dukungan akan merasa nyaman, lebih percaya diri, lebih rileks, dan lebih mampu menghadapi tantangan seperti pelekatan bayi yang sulit atau produksi ASI yang belum stabil.

Sebaliknya, ibu yang mendapat tekanan, kritik, atau bahkan stigma saat menyusui di tempat umum bisa merasa malu, stres, dan memilih berhenti menyusui lebih awal.

Dalam memperingati Pekan Menyusui Sedunia (World Breastfeeding Week) tahun 2025 yang mengangkat tema "Prioritaskan Menyusui: Bangun Sistem Dukungan yang Berkelanjutan", mari kita bahas lebih lanjut mengenai sistem pendukung mencakup dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, hingga kebijakan pemerintah



dalam mendukung keberhasilan menyusui.

Strategi Penciptaan Lingkungan yang Mendukung Ibu Menyusui

1. Dukungan Keluarga
Peran keluarga, khususnya suami, sangat penting dalam menunjang keberhasilan menyusui. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak serta pemahaman tentang pentingnya ASI akan membantu ibu merasa lebih percaya diri dan nyaman saat menyusui, sehingga meningkatkan keberhasilan menyusui.
2. Fasilitas Umum
Penyediaan ruang laktasi di fasilitas publik seperti perkantoran, stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, dan tempat rekreasi perlu menjadi prioritas seperti yang tertuang pada Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. Penyediaan ruang laktasi di tempat umum dan kerja sudah menjadi kewajiban hukum di Indonesia, dengan standar teknis yang jelas untuk memastikan kenyamanan dan privasi ibu menyusui. Implementasi yang konsisten adalah kunci untuk mendukung ibu menyusui dalam menjalankan haknya.
3. Lingkungan Kerja
Ibu yang kembali bekerja setelah melahirkan membutuhkan kebijakan yang ramah laktasi. Instansi pemerintah dan swasta diharapkan dapat menyediakan sarana pendukung seperti ruang laktasi yang layak, memberikan waktu bagi ibu untuk menyusui/memerah ASI, kebijakan jam kerja fleksibel bagi ibu menyusui serta cuti melahirkan yang memadai. Dukungan ibu menyusui di lingkungan kerja tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian



Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi merupakan hak dasar anak

ASI Eksklusif. Tak hanya itu, dukungan langsung dari atasan dan rekan kerja, serta tidak adanya stigma terhadap ibu yang meninggalkan meja kerja untuk memerah ASI akan membuat ibu merasa nyaman dan aman untuk memerah ASI di kantor, sehingga dapat memperpanjang masa menyusui.

Ketika seorang ibu merasa aman, dihargai, dan didukung dalam menjalankan perannya sebagai pekerja sekaligus pemberi ASI, maka produktivitas, loyalitas, dan semangat kerja pun meningkat. Oleh karena itu, sudah saatnya setiap instansi dan perusahaan menjadikan kebijakan ramah ibu menyusui sebagai standar, bukan pengecualian.

4. Pelayanan Kesehatan yang Terintegrasi
Tenaga kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit memiliki peran besar dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi ibu menyusui. Konseling menyusui sejak masa kehamilan hingga setelah persalinan dapat membantu ibu melewati berbagai tantangan awal, seperti nyeri puting karena posisi dan pelekatan yang kurang tepat. Adanya bantuan praktis dari tenaga kesehatan dapat membuat ibu kembali percaya diri dan nyaman untuk menyusui.

Dukungan terhadap Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan promosi ASI eksklusif selama enam bulan pertama juga harus terus diperkuat.

5. Kebijakan dan Regulasi
Pemerintah dan pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab dalam menciptakan sistem yang melindungi hak ibu menyusui. Undang-undang tentang cuti melahirkan, fasilitas ruang laktasi, dan larangan promosi susu formula yang tidak sesuai bisa menjadi langkah konkret menciptakan lingkungan menyusui yang kondusif.

Menyusui: Tanggung Jawab Bersama

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi merupakan hak dasar anak dan bentuk perlindungan kesehatan ibu. Selain manfaatnya yang luar biasa untuk pertumbuhan, daya tahan tubuh, dan perkembangan kecerdasan anak, menyusui juga merupakan bagian dari pemenuhan komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bukan hanya tanggung jawab ibu, melainkan tanggung jawab kita semua. Menciptakan lingkungan yang nyaman bagi ibu menyusui bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum, melainkan wujud nyata komitmen institusi terhadap hak anak, kesetaraan gender, dan kesehatan keluarga.

Mari kita dukung ibu menyusui, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata! Mendukung ibu menyusui berarti mendukung masa depan bangsa. Sudah saatnya kita semua menjadi bagian dari ekosistem yang ramah dan pro-ASI demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan unggul. 🌱



Oleh:
Azriansyah

Peran Lembaga Legislatif dalam Penulisan Sejarah Nasional

Pembelajar ilmu politik. Mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu politik di Northern Illinois University, Amerika Serikat, dengan konsentrasi di bidang politik perbandingan dan politik di Amerika Serikat.

Tak dapat dipungkiri bahwa sejarah sangatlah penting dalam terbentuknya identitas suatu bangsa.

Lahirnya rasa kebangsaan atau nasionalisme sebagai sebuah elan yang menyatukan dan menggerakkan individu dari latar belakang yang berbeda tidak dapat dilepaskan dari sejarah. Dalam perspektif Andersonian, nasionalisme merupakan imaji tentang sebuah komunitas sebangsa (imagined communities) tersebar luas melalui print capitalism, yang merupakan produk dari penulisan sejarah. Dalam amatan Ernest Renan, pengalaman hidup bersama dalam sebuah komunitas (shared experience) yang melahirkan rasa kebangsaan tidak akan tersimpan dalam memori kolektif jika narasi kebersamaan itu tidak tercatat dalam sejarah. Dengan demikian, segala ikhtiar yang berkelindan dengan penulisan sejarah suatu bangsa haruslah menjadi upaya



bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Dalam konteks inilah maka inisiatif DPR untuk aktif dalam mengawasi penulisan ulang sejarah Indonesia adalah keniscayaan yang lumrah dalam suatu format politik demokratik. Inisiatif tersebut sepatutnya bukanlah cawe-cawe politik untuk mendistorsi narasi sejarah untuk melegitimasi penguasa, melainkan upaya seluruh elemen bangsa yang melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif untuk menjaga agar proses pembentukan Indonesia sebagai suatu bangsa tetap berjalan di koridor yang seharusnya. Sudah sepatutnya jika kegiatan penulisan ulang sejarah nasional yang digawangi oleh Kementerian Kebudayaan diiringi dengan pengawasan dari DPR. Pengawasan ini merupakan bagian dari keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa dalam memelihara narasi yang mengikat rasa kebangsaan Indonesia.

Pertanyaannya adalah bagaimana implementasi dari pengawasan tersebut? Apakah pembentukan tim pengawasan lintas komisi yang dilakukan oleh DPR sudah cukup? Dalam amatan penulis, apapun format yang dipilih oleh DPR untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah nasional ini perlu memperhatikan setidaknya tiga aspek. *Pertama*, pengawasan yang dilakukan oleh DPR harus memprioritaskan tidak adanya monopoli atas tafsir sejarah nasional dengan menjamin bahwa setiap warga negara dilindungi kebebasannya dalam mengartikulasikan pendapatnya tentang sejarah nasional. Poin pertama ini adalah pengejawantahan dari amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dalam memberikan pendapat. DPR harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak bagi warga negara yang memiliki



Pengawasan ini merupakan bagian dari keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa dalam memelihara narasi yang mengikat rasa kebangsaan Indonesia

pendapat yang berbeda, tentunya dengan bukti sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan narasi sejarah yang dihasilkan oleh tim penulisan dari Kementerian Kebudayaan.

Kedua, DPR dapat menggunakan fungsi bujetnya untuk menginisiasi pendanaan bagi komunitas akademik untuk melakukan penelitian di berbagai bidang pengetahuan, termasuk sejarah. Riset sejarah yang dilakukan secara independen akan menghasilkan produk yang obyektif, kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini, DPR dapat menginisiasi pembentukan atau penunjukan lembaga independen yang bertugas menyalurkan dana dari negara untuk keperluan riset ilmiah di berbagai bidang ilmu. DPR dapat mengambil inspirasi dari lembaga-lembaga seperti *National Science Foundation* di Amerika Serikat atau *Swiss National Science Foundation* di Swiss yang merupakan lembaga independen dengan mandat dari negara untuk menyalurkan dana publik untuk keperluan riset ilmiah. Status lembaga yang independen dapat menjaga muarah dari produk ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti yang mendapatkan pendanaan dari lembaga tersebut yang proses seleksinya berlangsung secara transparan dan akuntabel. Dengan

demikian segala syak wasangka bahwa riset yang dihasilkan, termasuk di bidang sejarah, adalah demi melayani kepentingan penguasa dengan sendirinya terbantahkan.

Terakhir, seiring dengan telah berlangsungnya kegiatan penulisan ulang sejarah nasional tersebut oleh Kementerian Kebudayaan, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan memfasilitasi partisipasi publik atas hasil penulisan sejarah tersebut. Atensi yang besar dan konsisten dari DPR atas perkembangan dari penulisan ulang sejarah nasional akan meningkatkan perhatian publik atas narasi sejarah yang dihasilkan sehingga masukan kritis atas produk sejarah yang dihasilkan dapat meminimalisir bias dari penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Rapat Dengar Pendapat yang rutin diselenggarakan oleh DPR misalnya dapat menjadi forum yang memfasilitasi publik dalam mengakses informasi yang terkait dengan kegiatan penulisan ulang sejarah nasional ini. Pernyataan-pernyataan publik yang dibuat oleh para anggota DPR secara kritis juga membantu agar isu penulisan sejarah ini tetap terpelihara sebagai isu nasional yang penting.

Akhir kata, sejarah nasional suatu bangsa tidak saja melahirkan rasa kebangsaan tetapi juga ikut berperan dalam memelihara eksistensi dari rasa kebangsaan itu. Tafsir tunggal dan monopoli atas sejarah nasional tidak hanya melahirkan nasionalisme yang sempit dan kerdil, tetapi juga mencerminkan kepicikan dari sebuah bangsa dalam merawat narasinya sendiri. Pengawasan dan partisipasi publik baik secara formal melalui wakil-wakilnya di legislatif maupun oleh masyarakat sipil sangatlah penting dalam menjaga dan memelihara keabadian dari ikatan keindonesiaan ini dan menjaga agar segenap insan bangsa Indonesia ini tidak menjadi katak dalam tempurung. 🐸

LENSA PARLE



**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

DELAPAN DEKADE
Kemerdekaan
SEMANGAT TAK PERNAH PADAM

Narasi: Naefuroji • Foto : Jaka, Farhan, Dep, Runi



Tahun ini, Indonesia memasuki usia ke-80 sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Sebuah momen bersejarah yang tidak hanya menjadi tonggak bebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga simbol tekad untuk membangun negeri yang berdaulat, adil, dan makmur. Di berbagai daerah, peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dipenuhi semangat dan antusiasme masyarakat dalam merayakan pencapaian delapan dekade perjalanan bangsa.

Upacara bendera tetap menjadi inti dari perayaan, berlangsung khidmat di sekolah-sekolah, instansi pemerintahan, hingga pelosok desa. Bendera merah putih berkibar gagah, disambut nyanyian lagu kebangsaan yang menggema penuh haru. Generasi muda tampil sebagai pengibar bendera, seolah menyampaikan pesan bahwa tongkat estafet perjuangan kini berada di tangan mereka. Mereka adalah harapan untuk menjaga dan meneruskan semangat kemerdekaan dalam tantangan zaman yang terus berubah.

Tak hanya upacara, berbagai kegiatan turut mewarnai peringatan kali ini. Lomba-lomba rakyat seperti panjat pinang, tarik tambang, dan balap karung kembali menggairahkan ruang-ruang publik, membangun

kebersamaan dan kegembiraan. Di sisi lain, parade budaya dan pameran UMKM menunjukkan potret Indonesia yang kaya tradisi, namun juga bergerak maju secara ekonomi dan teknologi. Perayaan ini menjadi refleksi keberagaman dan kekuatan persatuan.

Kehadiran para veteran dalam rangkaian acara menjadi pengingat harga mahal dari sebuah kemerdekaan. Wajah mereka mungkin telah menua, tetapi semangat juangnya tetap menyala. Kisah perjuangan mereka di medan tempur menjadi inspirasi bagi generasi sekarang untuk terus mencintai tanah air, tidak hanya dengan kata-kata, tapi lewat aksi nyata membangun bangsa.

Peringatan HUT RI ke-80 bukan sekadar seremoni tahunan. Ia adalah momentum untuk merenung, bersyukur, dan menatap masa depan. Menuju Indonesia Emas 2045, bangsa ini dihadapkan pada tantangan besar sekaligus peluang emas. Dengan semangat gotong royong, inovasi, dan cinta tanah air, delapan puluh tahun kemerdekaan harus menjadi titik loncatan untuk Indonesia yang lebih kuat, adil, dan berdaya saing di kancah global. 🇮🇩







SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

MENGUCAPKAN :

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

80

**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri